

**PENINGKATAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DENGAN MODEL
PEMBELAJARAN *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE*
DALAM PEMBELAJARAN PKn KELAS VIII SMP NEGERI 2
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

(Tesis)

Oleh
Lismardalena Andriyani



**PROGRAM PASCASARJANA PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016**

**PENINGKATAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DENGAN MODEL
PEMBELAJARAN *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE*
DALAM PEMBELAJARAN PKn KELAS VIII SMP NEGERI 2
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Oleh :

Lismardalena Andriyani

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, sistem penilaian, efektivitas), dalam penerapan model pembelajaran *VCT* untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi kelas VIII di SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas atau *class room action research* meliputi empat rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi.

Hasil penelitian pada tahap perencanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *value clarification technique*. Diketahui dari siklus I memperoleh skor 16 dengan kategori **cukup**, siklus II memperoleh skor 22 dengan kategori **baik** dan siklus III memperoleh skor 29 dengan kategori **sangat baik**. Tahap pelaksanaan pembelajaran penilaian kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, siklus I diperoleh skor 32 dengan kategori **kurang baik**, siklus II memperoleh skor 50 dengan kategori **cukup baik** dan pada siklus III memperoleh skor 77 dengan kategori **baik**. Hasil penilaian terhadap peningkatan nilai-nilai demokrasi siswa pada siklus I memperoleh skor 15 dengan kategori **tidak baik**, siklus II memperoleh skor 25 dengan kategori **Cukup** dan siklus III skor 34 dengan kategori **sangat baik**. Efektivitas pada siklus 1 memperoleh skor 62,99 dengan kategori **cukup baik**, siklus 11 memperoleh skor 69 dengan kategori **cukup baik** dan siklus 111 memperoleh skor 79,77 dengan kategori **baik**.

Kata kunci : Nilai-nilai demokrasi , Model pembelajaran *value clarification technique (VCT)*,

**DEMOCRACY VALUES ENHANCEMENT BY LEARNING MODEL OF
VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE IN PKN STUDY
OF VIII LEVEL OF SMP NEGERI 2 SUKADANA
OF LAMPUNG TIMUR REGENCY
IN ACADMEIC YEAR 2015/2016**

By :

Lismardalena Andriyani

Abstract

The aim of this research is to obtain description about learning process (planning, implementation, assessment systems, effectiveness) and to understand and to analyze VCT learning model implementation to enhance democracy values in students of VIII level of SMP Negeri 2 Sukadana of Lampung Timur Regency. The method which was used in this research was Penelitian Tindakan Kelas or *class room action research* includes four series of planning, implementation, observation and reflection.

The result of research in the learning planning stage by using learning model of value clarification technique is that known from cycle's I was acquired score's 16 with category was **not good**. Cycle's II was acquired score's 22 with category was **good** and Cycle's III was acquired score's 29 was very good. In the stage of assessment learning implementation about teachers' ability in managing of learning process, cycle's I was obtained score's 32 with category was **less good**. Cycle's II was obtained score's 50 with category was **good enough**. Cycle's III was obtained score's 77 with category was **good**. The result of assessment about democracy values enhancement in cycle's I was got score's 15 with category was **not good**. Cycle's II was got score's 25 with category was **good enough**. Cycle's III was got score's 34 with category was **very good**. Effectiveness in Cycle's I obtained a score 62.99 with a **good enough** category, the Cycle's II obtained a score 69 with a **good enough** category and Cycle's III obtained a score 79.77 with **good** categories.

Key word: Democracy values, Learning Model of Value Clarification Technique (VCT)

**PENINGKATAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DENGAN MODEL
PEMBELAJARAN *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE*
DALAM PEMBELAJARAN PKn KELAS VIII SMP NEGERI 2
SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Oleh
Lismardalena Andriyani

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PENDIDIKAN

Pada

**Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**PASCASARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **PENINGKATAN NILAI-NILAI DEMOKRASI
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN *VALUE
CLARIFICATION TECHNIQUE* DALAM
PEMBELAJARAN PKn KELAS VIII SMP
NEGERI 2 SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN
2015/2016**

Nama Mahasiswa : **Rismardalena Andriyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1423031077

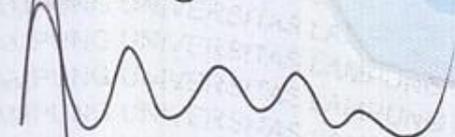
Program Studi : Magister Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

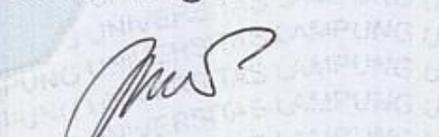
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

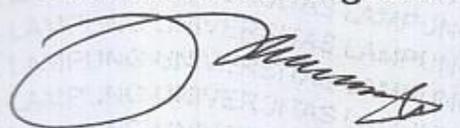
Pembimbing II



Dr. H. Pargito, M.Pd.
NIP 19590414 198603 1 005

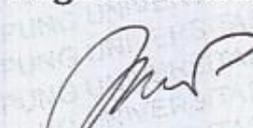
2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Ketua Program Studi
Magister Pendidikan IPS

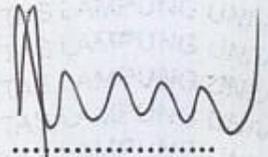


Dr. H. Pargito, M.Pd.
NIP 19590414 198603 1 005

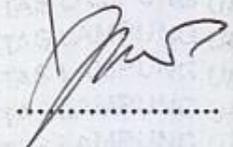
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Sudjarwo, M.S.



Sekretaris : Dr. H. Pargito, M.Pd.



Penguji Anggota : I. Dr. Darsono, M.Pd.



II. Dr. Irawan Suntoro, M.S.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP 19590722 198605 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. H. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 1 Juli 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul " Peningkatan Nilai-nilai Demokrasi dengan Model Pembelajaran *Value Clarification Technique* dalam pembelajaran PKN Kelas VIII SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/2016" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2016

Pembuat pernyataan



Lisnurdalena Andriyani
NPM 1423031077

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro 15 November 1970. Penulis adalah anak dari pasangan Bapak H. Zulkifli (Alm) dan Ibu Hj. Astridalela

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. Tahun 1983 tamat SD Negeri 1 Metro Kota Madya Metro, Lampung
2. Tahun 1986 tamat SMPN 1 Metro Kota Madya Metro, Lampung
3. Tahun 1989 tamat SPGN Metro , Kota Madya Metro, Lampung
4. Tahun 1993 tamat Mahasiswa FKIP pada Jurusan Pendidikan IPS Program Studi PMP-KN Universitas Lampung
5. Tahun 1995 penulis diangkat menjadi PNS di Penengahan, Lampung Selatan.
6. Tahun 1999 penulis pindah ke tempat tugas baru di SMP N 1 Pekalongan, Lampung Timur.
7. Tahun 2014 sampai sekarang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SMP N 2 Sukadana, Lampung Timur.
8. Tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung Jurusan Pendidikan IPS.

MOTTO

*“Hidup bermakna
apabila berguna bagi orang lain”.*

PERSEMBAHAN

Dengan Rasa Syukur yang mendalam kepada Allah SWT, kupersembahkan karya kecil ini kepada :

- ❖ *Suamiku Ajan Darmawan, S.Pd*
- ❖ *Buah hatiku, Shinta Marvina Darmawan dan Sintiya Melinia Darmawan*
- ❖ *Orang tuaku, kakak serta adiku tercinta*
- ❖ *Almamater Universitas Lampung*
- ❖ *Keluarga Besar Social Studies dan Civic Education*
- ❖ *Semua Yang Telah Menyayangi Ku*

SANWANCANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peningkatan Nilai-nilai Demokrasi dengan Model Pembelajaran *Value Clarification Technique* dalam pembelajaran PKn Kelas VIII SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/2016”.

Tesis ini di buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Lampung.

Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis sendiri, penulisan tesis ini pun tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung dan dosen Pembimbing 1 ditengah kesibukannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
3. Dr. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum selaku Dekan FKIP Universitas Lampung.

4. Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS Universitas Lampung.
5. Dr. Hi. Pargito, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Pendidikan IPS Universitas Lampung dan dosen pembimbing II, ditengah kesibukannya telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh keikhlasan.
6. Dr. Darsono, M.Pd., selaku pembahas I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Dr. Irawan Suntoro. M.S selaku pembahas II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak / Ibu Dosen Program Studi Magister Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Lampung.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan IPS angkatan 2014 genap yang selalu memberi motivasi.
10. Dewan guru dan staf TU SMP Negeri 2 Sukadana Lampung Timur yang telah mendukung dan memotivasi.
11. Siswa kelas VIII Tahun ajaran 2015/2016 yang telah membantu pada penelitian ini.

Semoga amal baik yang Bapak, Ibu, Saudara berikan, akan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
SANWACANA	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	14
a. Kegunaan Secara Teoritis	14
b. Kegunaan Secara Praktis	14
F. Ruang Lingkup	15
1. Ruang Lingkup Penelitian	15
2. Ruang Lingkup Ilmu	16
II. TINJUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori	18
1. Pendidikan Kewarganegaraan	18
2. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	19
3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	23
4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan	26
5. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan	28
B. Teori Belajar	30
C. Model Pembelajaran PKn	37
D. Konsep Nilai	46

1. Pengertian Nilai	46
2. Klasifikasi atau Pembagian Nilai	48
3. Prinsip-Prinsip dalam Pemilihan Nilai	50
4. Kualitas Nilai	51
5. Jenis dan Tingkatan Nilai	52
E. Penilaian	53
F. Pengertian Perencanaan Pembelajaran	57
G. Model Pembelajaran VCT	62
a. Pengertian VCT	62
b. Tujuan Model Pembelajaran VCT	63
c. Langkah-Langkah Pembelajaran VCT	64
d. Kelebihan Model Pembelajaran VCT	66
e. Kelemahan Model Pembelajaran VCT	66
H. Pengertian Demokrasi	67
I. Penelitian Yang Relevan	72
J. Kerangka Pikir	75

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	77
B. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas	78
C. Subjek Penelitian	82
D. Teknik Pengumpulan Data	82
E. Teknik Analisis Data	82
F. Indikator Keberhasilan	88

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	89
1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	89
B. Pelaksanaan Penelitian	91
C. Deskripsi Pra Pelaksanaan Tindakan	94
D. Deskripsi Hasil Penelitian	96
1. Hasil Siklus I	96
a. Tahap Perencanaan	96
b. Tahap Pelaksanaan	97
c. Hasil Observasi	101
d. Refleksi	107
2. Hasil Siklus II	110
a. Tahap Perencanaan	110
b. Tahap Pelaksanaan	111
c. Hasil Observasi	118
d. Refleksi	121
3. Hasil Siklus III	125
a. Tahap Perencanaan	125
b. Tahap Pelaksanaan	126
c. Hasil Observasi	132
d. Refleksi	135
E. Temuan Penelitian	137
F. Pembahasan Penelitian	140

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Hasil Survey dan Wawancara Pada Guru Bidang Studi PKn dan Siswa	6
4.1	Jadwal Penelitian	92
4.2	Skor Kemampuan Guru dalam Perencanaan	103
4.3	Skor Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran	105
4.4	Skor Hasil Penilaian Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi Siswa.	106
4.5	Skor Kemampuan Guru dalam Perencanaan.....	117
4.6	Skor Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran	119
4.7	Skor Hasil Penilaian Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi Siswa.	120
4.8	Skor Kemampuan Guru dalam Perencanaan.....	131
4.9	Skor Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran	132
4.10	Skor Hasil Penilaian Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi Siswa ..	134
4.11	Skor Hasil Penilaian Kemampuan Guru dalam Perencanaan Pembelajaran (RPP)	141
4.12	Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran <i>Value Clarification Technique</i>	143

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Dimensi Materi Pendidikan Kewarganegaraan.....	3
2. Kerangka Pikir	75
3. Model Penelitian Tindakan	79
4.1 Guru Membentuk Kelompok Belajar	99
4.2 Guru Bersama Siswa Membuat Kesimpulan	101
4.3 Siswa Melakukan Presentasikan Hasil Diskusi	114
4.4 Guru Melakukan Tanya Jawab.....	115
4.5 Guru Membimbing Siswa	128
4.6 Siswa Mempersentasikan Hasil Diskusi Kelompok.....	129
4.01 Hasil Penelitian Siklus 1, 2, dan 3.....	139
4.02 Hasil Penilaian Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi Siswa dari Siklus 1 Sampai Siklus 3.	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian	151
2. Surat Balasan Penelitian.....	152
3. Penunjukkan Pembimbing	153
4. Kesiapan Membimbing Tesis.....	154
5. Jadwal Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas	155
6. Lembar Persetujuan Seminar Proposal Tesis.....	156
7. Proses Pembimbingan Tesis.....	157
8. Persetujuan Perbaikan Seminar Proposal.....	159
9. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	160
10. Permohonan Seminar Hasil Tesis	163
11. Lembar Persetujuan Seminar Hasil Tesis	165
12. Lembar Persetujuan Perbaikan Seminar Hasil.....	166
13. Lembar Persetujuan/ACC Ujian Tesis	167
14. Jadwal Mengajar SMP N 2 Sukadana Semester Genap 2015/2016.....	168
15. Contoh RPP kelas VIII.....	169
16. Silabus	170
17. Hasil Dokumentasi	171
18. Instrumen Penelitian	172

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan konsekuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila. Usaha sadar ini dilaksanakan secara terarah dan terencana, yang dimanifestasikan dalam kurikulum sekolah-sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, melalui pendidikan formal.

Sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran untuk membimbing, mendidik, melatih dan mengembangkan kemampuan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan nasional antara lain menjadi manusia yang taqwa, warga negara yang baik, dan manusia yang berbudi pekerti luhur. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

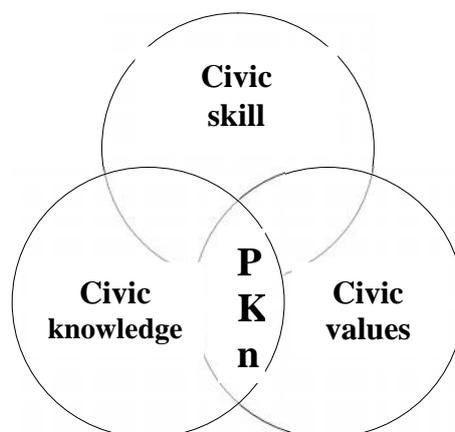
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan memegang peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap individu yang terlibat di dalam pendidikan itu dituntut berperan secara maksimal dan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan harus memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu diantaranya membangun kualitas manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga negara yang ber Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan memiliki sikap demokratis.

Peran guru sangat menentukan dalam proses keberhasilan pendidikan namun dewasa ini guru lebih banyak mendominasi sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat minim. Hal tersebut menyebabkan siswa lebih banyak diam dan memperhatikan guru saja dan siswa bersifat pasif. Sehingga tujuan pembelajaran kurang tercapai maksimal sesuai yang diharapkan. Mentransformasikan nilai-nilai Pancasila terhadap siswa, tidak hanya dengan mengalihkan nilai-nilai Pancasila saja, tetapi mengembangkan pada diri siswa,

sehingga terbentuk pribadi dengan sikap dan perilaku yang selalu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pengembangan nilai dimaksudkan agar siswa dapat mencerna melalui akalinya, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuannya mengembangkan rasionalitas tentang nilai Pancasila, sehingga siswa mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin., maka Pendidikan Kewarganegaraan berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan menduduki tempat yang sangat sentral dan strategis dalam konstelasi pendidikan nasional.

Kajian atau titik sentrum Pendidikan Kewarganegaraan selalu berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka sebagaimana dapat digambarkan, kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Dimensi Materi PKn (Sumber : Depdiknas, 2003: 2)

Diagram di atas menggambarkan bahwa mata pelajaran PKn terdiri dari 3 dimensi, antara lain: Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) mencakup antara lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, kebebasan individual, demokratis, toleransi, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas.

Kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kedewasaan dan wawasan siswa akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Pengembangan demokrasi, merupakan salah satu dari kesembilan aspek kesadaran dan wawasan anak didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang terdapat dalam kajian dan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Maka oleh karena itu penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar siswa sebagai generasi penerus bangsa mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila.

Pengembangan demokrasi adalah materi yang menginformasikan, menanamkan, mengembangkan, serta mempertahankan nilai-nilai yang

terkandung dalam demokrasi agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Berikut hasil observasi di VIII SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1.1. Hasil Observasi di VIII SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur

No	Jumlah Siswa		Presentase	Sikap yang muncul
	L	P		
1	5	9	53%	Ingin menang sendiri
2	11	7	69%	Tidak mendengarkan pendapat teman
3	7	10	65%	Kurang bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh guru

Sumber : Analisis Observasi Penelitian Pendahuluan

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diperoleh keterangan bahwa diantara materi yang dipelajari di kelas VIII semester genap tahun pelajaran 2015/2016, materi demokrasi adalah materi yang penerapannya sulit dilaksanakan oleh siswa. Hal ini terbukti dari pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sekitar 62% siswa yang menampakkan gejala sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, seperti kasus yang terjadi diantaranya selalu ingin menang sendiri, kurang bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh guru.

Pada proses pembelajaran yang menggunakan metode diskusi masih banyak pula siswa yang tidak berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan diskusi tersebut, kurang menghargai pendapat teman atau kelompok, siswa kurang saling memahami adanya pendapat yang berbeda, berperilaku kurang sopan dan cenderung merendahkan orang lain, kurang menghargai dan menerima

adanya perbedaan, siswa belum bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dan masih belum bisa menghargai hak asasi orang lain. Dapat disimpulkan bahwa masih ada siswa yang kurang memahami dan mengerti tentang demokrasi yang sesungguhnya dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan indikator bahwa perlu diadakannya suatu usaha supaya masalah –masalah yang ada dapat dirubah menjadi hal yang lebih baik dan tentunya semua warga negara pada akhirnya dapat menjalankan serta menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya.

Tabel 1.1 : Hasil Survey Dan Wawancara Pada Guru Bidang Studi PKn Dan Siswa, Pada SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

No	Ciri Cerminan Penyimpangan Nilai-Nilai Demokrasi	Sikap dan Perilaku Siswa
1	Sekitar 10% siswa di kelas yang terlambat datang kesekolah.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi indikator 9
2	Sekitar 15% siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah, bahkan sering kali terdapat peserta didik yang tidak mengerjakannya.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi indikator 4,6,9
3	Sekitar 62% siswa yang tidak menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi indikator 9,10
4	Pada proses pembelajaran pada saat diskusi masih sekitar 62% siswa yang tidak berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan diskusi, selalu ingin menang sendiri, dan selalu ingin memaksakan pendapatnya.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi indikator 2,3,8
5.	Dalam proses diskusi sekitar 53% siswa cenderung tidak mau menerima saran dan kritik dari rekannya.	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi indikator 1,7
6.	Sekitar 42% siswa kurang memiliki sikap toleransi dan menghormati sesama teman	Tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi indikator 1,8
7.	Pada saat diskusi kelas berlangsung dan	Tidak mencerminkan nilai-

terjadi silang pendapat biasanya sampai berujung pada rasa ketidaksukaan antar teman.	nilai demokrasi indikator 5,10
---	--------------------------------

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa SMP Negeri 2 Kelas VIII Sukadana Kabupaten Lampung Timur memiliki perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Materi demokrasi merupakan materi yang sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, suatu materi tersebut sebagai prasyarat untuk materi selanjutnya, misalnya materi demokrasi yang dipelajari pada tingkat SMP akan ditampilkan kembali pada tingkat SMA dalam materi sistem politik di Indonesia yang di dalamnya mencakup pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Jika materi demokrasi ini sudah dianggap sulit oleh siswa tanpa adanya penanggulangan, dikhawatirkan untuk materi yang berkaitan dengan materi tersebut sulit untuk dipahami oleh siswa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan survey yang telah dilaksanakan pada sekolah SMP Negeri 2 Kelas VIII, siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas maupun diluar kelas dalam unjuk kerja atau diskusi sangat terlihat sekali bahwa siswa belum memahami apalagi dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Diantara sikap yang muncul tersebut diantaranya yaitu kurang menghormati adanya perbedaan pendapat sampai pada perbedaan latar belakang dari siswa itu sendiri sehingga hal tersebut memicu konflik antara siswa ketika proses pembelajaran maupun pada saat diluar kelas, perilaku siswa yang tidak menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab dengan tidak mengembalikan atau merusak buku perpustakaan sekolah. Pada proses pembelajaran yang

menggunakan metode diskusi sering kali terjadi pada proses pembelajaran yang menggunakan metode diskusi masih banyak siswa yang tidak berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan diskusi, selalu ingin menang sendiri, dan selalu ingin memaksakan pendapatnya.

Selain dari sikap dan perilaku di atas juga ada perilaku yang muncul dalam proses diskusi siswa cenderung tidak mau menerima saran dan kritik dari rekannya, pada saat diskusi kelas berlangsung dan terjadi silang pendapat biasanya sampai berujung pada rasa ketidaksukaan antar teman dan selain itu muncul siswa jarang mengerjakan tugas dengan baik, bahkan sering kali terdapat siswa yang melalaikan tugas guru dengan tidak mengerjakannya.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul perlu adanya perbaikan yang serius oleh guru dan sekolah dalam hal ini sebagai lembaga sangat berperan penting dalam mengatasi hal tersebut. Guru sebagai ujung tombak yang terdepan diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dapat membawa siswa kearah perbaikan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian sampai pada pemilihan model pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi kepada siswa sehingga proses pembelajaran dapat berdampak pada siswa menjadi lebih baik. Oleh karena itu guru harus dapat membuat dan melaksanakan proses pembelajran dengan baik, dimulai dari perencanaan yang dibuat oleh guru harus matang dan memperhatikan kemampuan siswa dan keadaan sekolah, Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan

pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dengan langkah awal dalam menyusun atau membuat perencanaan yang matang dan sudah mempertimbangkan berbagai hal, maka dalam tahap pelaksanaan tidak akan menemui banyak kendala.

Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari proses ini adalah perubahan perilaku siswa. perencanaan pembelajaran juga merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan demikian, hasil akhir dari proses pembelajaran akan menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni.

Pada tahap pelaksanaan guru harus melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelum proses pembelajaran dilaksanakan sehingga diharapkan guru bisa secara runtut dan terprogram dengan baik pada saat mengajar di kelas. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang menentukan dalam proses pembelajaran, karena tahap pelaksanaan dimana rencana pembelajaran yang telah dibuat

sebelumnya akan diimplementasikan dalam sebuah proses kegiatan yang akan dilaksanakan didalam ataupun di luar kelas melihat dan merujuk pada rencana yang dibuat sebelumnya. Dalam tahap pelaksanaan ini guru diharapkan dapat melaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat sehingga proses pembelajaran akan runtut serta tujuan dari pembelajaran itu sendiri bisa tercapai dengan baik.

Pada tahap penilaian guru harus juga melaksanakan penilaian secara berkala kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami dan mengerti materi yang telah dibahas. Dengan penilaian yang dilakukan oleh guru secara berkala akan lebih mempermudah guru mengetahui perkembangan siswa sehingga apabila terdapat siswa belum mencapai ketuntasan belajar sesuai yang diharapkan akan cepat diketahui dan diambil tindakan yang akan dapat mengatasi hal tersebut. Selain itu kegiatan penilaian atau menilai dalam pembelajaran merupakan salah satu tugas dari guru yang harus dilaksanakan setelah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Disamping itu penilaian yang dilakukan oleh guru juga harus dilakukan secara komperhensif yang berarti mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Dan tidak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran pemilihan model pembelajaran sangat berpengaruh pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, oleh karena itu pemilihan model pembelajaran harus tepat disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa, serta kebutuhan dari tujuan dari proses pembelajaran. Dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan dan karakter materi dan kebutuhan siswa serta

melihat lingkungan sekolah akan juga mempengaruhi keberhasilan dari proses pembelajaran.

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan akan mempercepat tercapainya dari tujuan pembelajaran yang diharapkan. Efektif atau tidaknya model pembelajaran yang digunakan oleh guru terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran disisi lain guru juga sebagai penentu terlaksananya model pembelajaran yang digunakan. Salah satu model pembelajaran yang sejalan dengan peningkatan nilai-nilai demokrasi yaitu model pembelajaran *Value Clarification Technique (VCT)*.

Djahiri (1979: 116) model pembelajaran *Value Clarification Technique*, (*VCT*) dimaksudkan untuk “melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai, mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian dilaksanakannya sebagai warga masyarakat”.

Model pembelajaran yang mengklarifikasi nilai (*value clarification technique*) atau sering disingkat *VCT* dapat membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. menurut A. Kosasih Djahiri (1992), dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena; pertama, mampu membina dan mempribadikan nilai dan moral; kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan; ketiga mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata; keempat,

mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi afektualnya; kelima, mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan; keenam, mampu menangkal, meniadakan mengintervensi dan menyubversi berbagai nilai moral yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang; ketujuh, menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap perlu adanya penelitian tentang permasalahan ini. Penelitian ini diharapkan akan dapat melihat kekuatan model yang tepat untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah penerapan model *Value Clarification Technique* untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Sub fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan model pembelajaran *VCT*.
2. Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran *VCT* dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi.
3. Sistem penilaian pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan model pembelajaran *VCT*.

4. Efektivitas pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan menggunakan model pembelajaran *VCT*

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah Bagaimanakah pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan menggunakan model pembelajaran *VCT* kelas VIII di SMP N 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dan secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan model pembelajaran *VCT*.
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran *VCT* dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi.
3. Bagaimanakah sistem penilaian pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan model pembelajaran *VCT*.
4. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan menggunakan model pembelajaran *VCT*.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan model pembelajaran *VCT* untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi kelas VIII di SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Perencanaan pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan model pembelajaran *VCT*.
2. Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran *VCT* dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi.
3. Sistem penilaian pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan model pembelajaran *VCT*.
4. Efektivitas pembelajaran PKn dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi dengan menggunakan model pembelajaran *VCT*

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat bermanfaat dan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak khususnya yang berprofesi dalam bidang pendidikan, antara lain:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang demokrasi. serta memfokuskan pada pembentukan warganegara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memperluas serta memperdalam

wawasan dalam dinamika pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan masalah proses pendidikan kewarganegaraan dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi kepada siswa.

- 2) Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk dapat merubah sikap siswa dalam hubungan sosial.
- 3) Bagi siswa meningkatkan kemampuan memahami dan menjelaskan konsep dan nilai dalam materi Kewarganegaraan (*ranah kognitif*), meningkatkan kecerdasan emosional siswa (*ranah afektif*), meningkatkan keterampilan berwarganegara (*ranah psikomotorik*).

F. Ruang Lingkup

1). Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Subyek

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 2 Sukadana Lampung Timur tahun pelajaran 2015/ 2016.

b. Ruang Lingkup Obyek

Objek penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran *VCT* dan peningkatan nilai-nilai demokrasi

c. Ruang lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Sukadana Lampung Timur

d. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini.

2) Ruang Lingkup Ilmu

Pendidikan IPS (*Social Studies*) menurut (Somantri dalam Sapriya 2002: 92), ” Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan”.

Menurut Nu'man Somantri (2001: 92). “PIPS adalah suatu *synthetic discipline* yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Makna *synthetic discipline*, bahwa PIPS bukan sekedar mensistesisikan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan, yaitu; Sebagai pendidikan kewarganegaraan, sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, dan sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif.

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan IPS dengan wilayah kajian pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, karena pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *civic ideals and practices*, yaitu dalam rangka membentuk warganegara yang baik, cerdas (*good and smart citizen*), terampil dan punya keperibadian serta karakter yang kuat.

Konsep-konsep Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang termuat di dalam lima tradisi *social studies* yaitu sebagai berikut :

1. IPS sebagai Tranmisi Kewarganegaraan (*social studies as citizenship transmission*),
2. IPS sebagai Ilmu-Ilmu Sosial (*social studies as social sciences*),
3. IPS sebagai Penelitian Mendalam (*social studies as reflektive inquiry*),
4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai Kritik Kehidupan Sosial (*social studies as social criticism*) dan
5. IPS sebagai Pengembangan Pribadi Individu (*social studies as personal development of the individual*).

Penelitian ini terfokus pada pada tradisi (*social studies as citizenship transmission*) Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai Tranmisi Kewarganegaraan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebelumnya dikenal dengan nama "*Civics*" dalam kurikulum SMA tahun 1962. Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P & K :1962). Selanjutnya dalam kurikulum 1975 istilah tersebut diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No20/2003)

Memperhatikan isi dari UU tersebut di atas tentang sistem pendidikan nasional, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari bangsa itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan harus memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga Negara yang ber Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dengan lingkungan, serta sehat jasmani dan rohani.

2. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Winataputra (2001: 131) memperhatikan perkembangan pemikiran tentang *civic* dan *civic education*, atas dasar kajiannya secara teoritik, Winataputra merumuskan pengertian "*civics*," *citizenship/civic education*" sebagai berikut:

- a. *"Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility."*
- b. *"Civic/Citizenship education can be defined in two ways:*
 1. *In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge attitudes, and skills so the students become "good citizens, with learning experiences carefully selected and organized around the basic concepts of political science,*

2. *In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of a complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility.”*

Disimpulkan berdasarkan pendapat Winataputra di atas, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berisikan tentang pemerintahan yang diajarkan di sekolah, dimana dalam keadaan pemerintahan yang demokratis tersebut, warga negara hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Definisi pendidikan kewarganegaraan berikutnya menurut Winataputra, bahwa pendidikan kewarganegaraan juga berisikan tentang bagaimana mengembangkan sikap, keterampilan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, dimana siswa bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar dan memiliki konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Modul Kapita Selekt PKn (Standar Isi BSNP 2006: 7) pengertian PKn adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa PKn merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut M Daryono (1998:1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah “nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah”.

SK Mendikbud (No. 060/U/1993: 69), ”pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warga negara maupun antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara”.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru pasca KBK (2003:2) “Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang terdapat dalam

sekolah yang berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan produk Lembaga Tertinggi Negara Tahun 1973. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan konsekuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, secara yuridis formal telah diterima sebagai dasar negara. Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah bahwa dalam penyelenggaraan negara segala gerak langkahnya harus sejalan dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai mata pelajaran, PKn membawa misi khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan yang pencapaiannya dibebankan kepada mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran PKn, adalah membimbing generasi muda untuk memahami dan menghayati Pancasila secara keseluruhan dan setiap sila darinya (*Kerangka Program PKn*).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada anak didik. Pengembangan nilai dimaksudkan anak didik dapat mencerna melalui akal, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuannya mengembangkan rasionalitas tentang nilai Pancasila, sehingga anak akan mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila. Maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menduduki tempat yang sangat sentral dan strategis dalam konstelasi pendidikan nasional.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Menurut M. Daryono dkk (1999: 29)“ Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian bangsa, yang melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila, tanpa PKn, segala kepintaran atau akal, ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecekatan, tidak memberikan jaminan pada terwujudnya masyarakat Pancasila”.

S. Sumarsono (2005: 87), menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek moral dengan tujuan mengembangkan manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa PKn mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak bisa lepas dari pendidikan nasional, dalam arti merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan nasional.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, dalam kehidupan yang demokratis. Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain. Partisipasi warganegara dalam masyarakat demokratis, tentunya didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab warganegara.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru PKn berdasarkan standar isi BSNP (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 2) Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Berpikir secara kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis berkembang diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam modul Kapita Selektta Pendidikan Kewarganegaraan (Standar Isi 2006:7) secara eksplisit tercantum tujuan kurikuler PKn adalah kelima Pancasila, yaitu sebagai berikut :

- 1) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila persatuan Indonesia.
- 4) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari rumusan tujuan kurikuler tersebut, yang sangat jelas menggunakan istilah: memahami, menghayati, dan mengamalkan, maka berarti bahwa tujuan PKN itu meliputi:

- a. Aspek kognitif (pengetahuan, memahami), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berfikir/nalar.
- b. Aspek afektif (nilai, menghayati), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya.
- c. Aspek psikomotor (perilaku, mengamalkan), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi system syaraf dan otot (*neuronmuscular system*) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari : (a) kesiapan (*set*); (b) peniruan (*imitation*); (c) membiasakan (*habitual*); (d) menyesuaikan (*adaptation*) dan (e) menciptakan (*origination*).

Menurut Ace Suryadi, (2009: 15) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung

jawab dalam kehidupan politik warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mendidik peserta didik untuk dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab.

Dan pendidikan kewarganegaraan yang dimanifestasikan di dalam kurikulum sekolah ialah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

4. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pada bagian yang lain dalam Paradigma Baru PKn (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2006:11) disebutkan juga fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah :

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila secara dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.
3. Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antara warga negara dengan sesama warga Negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dapat bertanggung jawab dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Seperti halnya mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn di sekolah memiliki rambu-rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu-rambu ini berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, efektif dan efisien.

Berdasarkan modul Kapita Selekt PKn (Standar Isi BSNP 2006:14) disebutkan bahwa :

Rambu-rambu pembelajaran PKn yaitu :

- 1) Membina tatanan nilai moral Pancasila secara utuh, bulat dan berkesinambungan sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
- 2) Wujud pembinaan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn melalui pembinaan konsep nilai moral Pancasila.
- 3) Membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus.
- 4) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah salah satu perangkat kurikulum dan pedoman bagi guru.
- 5) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn merupakan program minimal yang diorganisasikan ke dalam sistem semester, jatah waktunya 16 kali pertemuan.
- 6) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan ke dalam nilai instrumental.

- 7) Rumusan tujuan PKn setiap kelas mengandung nilai moral Pancasila yang harus dikembangkan pada tingkat atau kelas dalam bentuk tujuan instruksional khusus.
- 8) Prinsip penyajian nilai dimulai dari mudah ke sukar, sederhana ke rumit, konkrit ke abstrak, lingkungan kehidupan siswa.
- 9) Penentuan kegiatan belajar mengajar didasarkan pada kebermanfaatan, kedekatan, dan harapan masyarakat, bangsa dan negara.
- 10) Uraian setiap pokok bahasan mencakup dua proses, yaitu pengenalan nilai, dan pembahasan atau pengamalannya.
- 11) Melakukan hubungan, bebas memilih strategi, metode dan media serta evaluasi, yang melibatkan orang tua dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, mata pelajaran PKn merupakan suatu mata pelajaran yang mementingkan perubahan pada tingkah laku siswa, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajarannya harus terfokus pada siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut seorang guru harus dapat mengembangkan segala kemampuan yang ia miliki, dengan tetap berpatokan pada rambu-rambu pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran.

5. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pasca KBK memiliki karakteristik pendidikan pengajarannya, sehingga ia mengemban misi (Standar isi BSNP) :

1. Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru, sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga negara yang demokratis. Misi tersebut dilakukan melalui penetapan kemampuan dasar PKn, sebagai landasan

penyusunan standar kemampuan serta standar minimum yang ditetapkan secara rasional.

2. Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam sila-sila demokrasi Indonesia. Misi tersebut dilakukan melalui penyusunan uraian materi pada masing-masing standar materi PKn yang dapat memfasilitasi berkembangnya pendidikan demokrasi.

Sedangkan visi PKn menurut standar isi BSNP ialah (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006) :

“Mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Dari misi dan visi tersebut, sangat jelas bahwa untuk membentuk warga negara yang baik sangat dibutuhkan konsep pendidikan yang demokratis yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan cita-cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warga negara dalam tatanan iklim yang demokratis.

B. Teori Belajar

Proses pembelajaran adalah suatu proses belajar dan mengajar yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai suatu proses pembelajaran, belajar merupakan suatu proses kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman dari pengalaman baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Belajar merupakan suatu proses perubahan dalam diri seseorang yang ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, daya pikir, sikap, kebiasaan dan lain-lain.

Sedangkan mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Sama halnya dengan belajar, mengajar pun hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Pada tahap berikutnya mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. (Sudjana, 2004: 59)

Menurut Moh. Uzer Usman (2002: 1) “Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbale balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”.

Selanjutnya dalam buku Pedoman Guru Pendidikan Agama Islam terbitan Depag RI (1990: 1), “Belajar mengajar sebagai suatu proses dapat

mengandung dua pengertian yaitu rentetan tahapan atau fase dalam mempelajari sesuatu, dan dapat pula berarti sebagai rentetan kegiatan perancangan oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut.”

Berdasarkan beberapa Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal dengan guru sebagai pemegang peranan utama jadi, keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar.

a. Pengertian Belajar

Sebagaimana dikatakan (Arikunto 2009: 19) bahwa: ”belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan dalam diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap”. Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh siswa. Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan asas yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan Sardiman (2004: 95) bahwa: ”aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi proses pembelajaran.

Belajar adalah suatu proses dimana peserta didik yang harus aktif, guru hanya berperan sebagai fasilitator. “Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing” (Asri Budinangsih: 2004: 10).

Sebagaimana dikatakan Arikunto (2009: 19) bahwa: ”belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan dalam diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap”. Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh siswa. Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan asas yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan Sardiman (2004: 95) bahwa: ”aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar”.

Menurut Trursan Hakim (2000: 01) mengatakan bahwa ” belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut di tempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, sikap, pemahaman, daya pikir dan pengetahuan ”.

Menurut Hamalik (2004: 24-25) bahwa segala kegiatan belajar yang dilakukan seseorang yang berupa kegiatan mendengarkan, merenungkan, menganalisa, berpikir, membandingkan, dan menghubungkan dengan masa lampau.

Menurut Gagne (1997: 23) belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway dalam Soemanto (1998: 27) mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki tiga ciri-ciri sebagai berikut:

1. belajar adalah perubahan tingkahlaku.
2. perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena pertumbuhan.
3. perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama.

Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Guru bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai strategi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal. Dalam pembelajaran proses belajar tersebut terjadi secara bertujuan dan terkontrol.

“Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan,

sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan” (Thursan Hakim,2005: 1).

Berdasarkan defenisi diatas, yang sangat perlu digaris bawah adalah bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu dalam berbagai bidang. Beberapa aktivitas belajar adalah:

- a. Mendengarkan
- b. Memandang
- c. Meraba,membau, dan mencicipi/ mencecap
- d. Menulis atau mencatat
- e. Membaca
- f. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi
- g. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan
- h. Menyusun paper atau kertas kerja
- i. Mengingat
- j. Berpikir
- k. Latihan dan praktek

Meskipun orang mempunyai tujuan tertentu dalam belajar serta telah memilih sikap yang tepat untuk merealisir tujuan itu, namun tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Setiap situasi dimanapun dan kapan saja memberikan kesempatan belajar kepada seseorang. Berikut ini prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar adalah prinsip-prinsip belajar.

Adapun prinsip-prinsip belajar tersebut sebagai berikut :

- a. Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas.
- b. Proses belajar akan terjadi apabila seseorang dihadapkan pada situasi problematis.
- c. Belajar dengan pengertian akan lebih bermakna dari pada belajar dengan hafalan.
- d. Belajar merupakan proses kontinu.
- e. Belajar memerlukan kemampuan yang kuat.
- f. Keberhasilan ditentukan oleh banyak factor.
- g. Belajar memerlukan metode yang tepat.
- h. Belajar memerlukan adanya kesesuaian antara guru dan murid.
- i. Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu sendiri.

(Thursan Hakim,2005: 2)

“Belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap. Kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.” (Witherington, dalam buku Dalyon,1997: 211).

Perwujudan prilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. Kecakapan.
2. Keterampilan.
3. Pengamatan.
4. Berpikir asosiatif dengan daya ingat.

5. Berfikir rasional.
6. Sikap.
7. Inhibisi.
8. Apresiasi.
9. Tingkah laku efektif.

(Dalyon, 1997: 213)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang diperlihatkan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Belajar merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Belajar menjadi ciri khas manusia yang sekaligus membedakannya dengan makhluk lain. Belajar dapat dilakukan manusia baik secara formal maupun non formal dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari sejak manusia dilahirkan hingga meninggal.

Peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu di dalam berbagai bidang. Meskipun seseorang mempunyai tujuan tertentu dalam belajar serta telah memilih sikap yang tepat untuk merealisasikan tujuan itu, akan tetapi tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi dengan situasi belajar. Setiap situasi dimana dan kapan saja memberikan kesempatan belajar kepada seseorang.

Salah satu teori yang terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental piaget. Teori ini biasa disebut teori perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif. Teori tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap

perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Sebagai contoh pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan Ruseffendi dalam Pranita (2010: 35).

Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Siswa tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru.

Beberapa prinsip belajar yang perlu diperhatikan adalah (1) belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas, (2) proses belajar akan terjadi apabila seorang dihadapkan pada situasi problematis, (3) belajar dengan pengertian akan lebih bermakna dari pada belajar dengan hafalan, (4) belajar merupakan proses kontinyu, (5) belajar memerlukan kemampuan yang kuat, (6) keberhasilan ditentukan oleh banyak faktor, (7) belajar memerlukan metode yang tepat, (8) belajar memerlukan kesesuaian antara guru dan murid, dan (9) belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu sendiri (Hakim, 2005: 2).

C. Model Pembelajaran PKn

Proses pembelajaran adalah konteks interaktif dimana paras siswa terlibat dalam berbagai pengalaman belajar (*learning experiences*) yang

memungkinkan perkembangnya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dengan pengarahan guru. Dalam proses tersebut sekurang-kurangnya terpaut dua persoalan pokok kurikuler yakni “apa yang dapat dipelajari” dan “bagaimana hal itu dapat dipelajari” . persoalan pertama menunjuk pada isi (*content*) dan kedua menunjuk pada aktivitas (*process*) kedua hal tersebut tidak bias dipisahkan. Dalam banyak hal isi menentukan proses, akan tetapi juga dalam kesempatan lain proses mewarnai isi.

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan tehknik pembelajaran.

Esensi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang didukung oleh model-model yang berorientasi pada pembinaan pribadi ialah “penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila”. Dalam kerangka konsep “*Confluent taxonomy*” proses penghayatan dan pengamalan ini tidak terlepas dari proses penalaran. Karena itu penerapan model-model pembinaan pribadi merupakan salah satu sarana bagi terbinanya pribadi siswa yang mencerminkan esensi nilai moral pancasila.

Sedangkan menurut Udin Saripuddin (1989 : 127) dalam Joyce dan Weil (1986) mengelompokkan model-model pembelajaran sebagi berikut :

1. Kelompok model pengolahan informasi atau “*The Information Processing Family*”.
Model pembelajaran pengolahan informasi menitik beratkan pada cara-cara memperkual dorongan-dorongan internal untuk memahami dunia ini dengan cara menggali dan mengorganisaisaikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya

- dan mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. beberapa model dalam kelompok ini memberikan kepada siswa sejumlah konsep, sebagian lagi menitikberatkan pada pembentukan konsep, dan pengetesan hipotesis, dan sebagian lainnya memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif.
2. Kelompok model personal atau "*The Personal Family*". Model personal beranak dari pandangan kedirian atau "*selfhood*" dari individu. Proses pendidikan sengaja diusahakan untuk memungkinkan siswa dapat memahami diri sendiri dengan kelompok model personal memusatkan perhatian pada pandangan perorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya.
 3. Kelompok model sosial atau "*The Social Family*". Kelompok model sosial ini dirancang untuk memanfaatkan kerjasama. Dengan kerjasama dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau "*energy*" secara bersama yang kemudian disebut "*synergy*".
 4. Kelompok model sistem prilaku "*The Behavioral Family*". Dasar teoritik umum dari kelompok model ini ahla teori-teori belajar social "*social learning theoris*". Model ini dikenal pula sebagai model modifikasi prilaku atau "*Bihavioral Modification*". Terapi prilaku atau "*Behavioral The Therapy*", dan Sibernetika atau "*Cybernetics*". Dasar pemikiran dari kelompok model ini ialah sistem komunikasi yang mengoreksi sendiri yang memodifikasi prilaku dalam hubungannya dengan bagaimana tugas-tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, model ini memusatkan perhatian pada prilaku yang terobservasi atau "*overt bahavior*", dan metode dan tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan.

Khusus mengenai pendidikan kewarganegaraan (PKn) Simon, Howe, dan Kirchenbaum (1972), (dalam Udin Saripuddin 1989: 130) mengajukan empat model umum yakni :

1. Model Penanaman Moral atau (*Moral Inculcation*).

Secara langsung dengan asumsi bahwa dalam setiap masyarakat terdapat nilai atau moral yang secara terus menerus telah dipraktekkan dan dites melalui pengalaman. Atas dasar asumsi itu, maka para pemuda atau generasi baru harus dibekali dengan paket nilai-nilai moral itu melalui proses transfer secara langsung.

2. Moral Transmisi Nilai

Asumsi dibalik model ini adalah tidak ada sistem nilai yang baik bagi setiap orang, karena manusia harus menguji dan memilih sendiri perangkat nilai yang dianggap cocok. Atas dasar itu maka para pemuda seyogyanya diberi kebebasan untuk berfikir dan menetapkan sendiri apa yang mau dilakukannya tanpa campur tangan orang dewasa.

3. Model Tauladan atau Modeling

Dengan asumsi penting sebagai orang dewasa harusnya menampilkan dirinya sendiri sebagai tauladan. Para pemuda akan melihat sendiri perilaku dan nilai yang dijunjung tinggi oleh orang dewasa dan pada akhirnya akan mengadopsi nilai dan perilaku itu melalui proses imitasi secara sadar.

4. Model Klarifikasi Nilai

Yang bertolak dari proses “*Valuing*” dimana manusia memegang kepercayaan dan membangun perilaku atas dasar kepercayaan itu. Model ini memiliki 7 (tujuh) proses sebagai berikut :

a. Bangga atas kepercayaan dan perilaku :

1. Menunjukkan rasa senang dan bangga
2. Menyatakannya pada orang lain

b. Memilih kepercayaan dan perilaku

3. Memilih dari berbagai alternatif
4. Memilih setelah menguji dan mempertimbangkannya
5. Memilih dengan leluasa/bebas

c. Bertindak atas dasar kepercayaan itu

6. Bertindak

7. Bertindak atas dasar suatu pola secara berulang-ulang dengan tetap/konsisten.

Dari berbagai alternatif model tersebut di atas, dapat dikelompokkan lagi model-model itu menjadi:

a. Model Yang Berorientasi Pada Penalaran Moral

Menurut Kohlberg, L. dalam Drs. John de Santo dan Drs. Agus Cremers (2007: 37) Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh kelompok model belajar mengapa yang berorientasi pada penalaran moral ialah “pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila”. Dimensi pemahaman yang merupakan bagian integral dari proses penalaran atau proses kognitif merupakan salah satu prasyarat bagi tumbuhnya proses penghayatan nilai/moral. Yang termasuk atau dapat dimasukkan kedalam model kelompok ini ialah model-model pengolahan informasi dengan menekankan pada konsep dan nilai moral pancasila, model-model klarifikasi nilai dan model-model lain yang menitikberatkan pada proses penalaran mengenai isu moral dalam kehidupan sehari-hari.

Secara singkat model-model yang termasuk kategori di atas, adalah sebagai berikut :

1. Model pencapaian konsep nilai/moral
2. Model berfikir induktif mengenai nilai moral atau “*Indicutive Thinking*”
3. Model latihan penelitian masalah nilai moral atau “*Inquiry Training*”
4. Model pemandu awal atau “*Advence Organizers*”

5. Model memorisasi “*Memorization*”
6. Model pengembangan intelek “*Developing Intellect*”.
7. Model penelitian ilmiah “*Scientific inquiry*”.

b. Model Yang Berorientasi Pada Interaksi Sosial.

Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh model-model interaksi sosial ini ialah” penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila”. Tentu saja tujuan ini tidak dapat dipisahkan dari esensi proses pemahaman/penalaran. Lebih-lebih karena secara konseptual progmatik pendidikan kewarganegaraan telah menerapkan konsep “*Confluent taxonomy*”.

Yang perlu dicatat bahwa titik berat model-model interaksi sosial ini adalah pada proses latihan menghayati hakikat nilai/moral melalui proses perlibatan langsung dalam proses-proses simulatif atau situasi sebenarnya. Dengan demikian penerapan model-model interaksi sosial ini juga merupakan sarana dan media penerapan konsep “*confluent taxonomy*” dalam pendidikan kewarganegaraan.

Secara singkat model-model yang termasuk kategori model di atas, sebagai berikut :

1. Model investigasi kelompok “*Group Investigation*”
2. Model bermain peran “*Role Playing*”
3. Model penelitian yurisprudensi “*Jurisprudential Inquiry*”
4. Model latihan laboratoris “*Laboratory Training*”.
5. Model penelitian sosial “*Social Science Inquiry*”.

c. Model Yang Berorientasi Pada Pembinaan Pribadi

Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh model-model yang berorientasi pada pembinaan pribadi ialah “penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila”. Dalam kerangka konsep “*Cofluent taxonomy*” proses penghayatan dan pengamalan ini tidak terlepas dari proses penalaran. Karena itu penerapan model-model pembinaan pribadi merupakan salah satu sarana bagi terbinanya pribadi siswa yang mencerminkan esensi nilai moral pancasila.

Jika dikembalikan kepada postulat pendidikan kewarganegaraan dari Piaget yang dipakai juga oleh Kohlberg (1975), model pembinaan pribadi akan memberi andil besar dalam membina keadaan bahwa perilaku manusia terikat akan norma yang berlaku . oleh karena itu harus ditumbuhkan dalam diri siswa, kualitas pribadi, dalam hal ini komitmen individu terhadap nilai-nilai moral.

Disamping kategori model ini meliputi model-model personal menurut Joyce dan Weil (1986) juga dapat ditambahkan model tauladan/Modeling dari Simon et-al (1972), “*Observation and Involvement in Model Issues*” dari Arbuthnot dan Faust (1981 : 200-203).

Beberapa model yang termasuk dalam kategori model di atas, adalah sebagai berikut :

1. Model pembelajaran tanpa arahan “*Non Directive Teaching*”.
2. Model sinektiks “*Synectics Model*”.
3. Model latihan kesadaran “*Awareness Training*”.

4. Model Pertemuan kelas “ *Classroom meeting*”.

d. Model Yang Berorientasi Pada Sistem Prilaku

Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh model-model yang berorientasi pada sistem prilaku ialah ”pengamalan nilai-nilai pancasila” yang tentunya dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan atas nilai moral pancasila. Walaupun dinyatakan bahwa prilaku moral tidaklah konstan kerana bersifat kontekstual, akan tetapi prilaku yang dilandasi pemahaman dan penghayatan tentu dapat dianggap lebih utuh. Oleh karena itu pembinaan prilaku sama pentingnya dengan pembinaan kognisi dan sikap.

Beberapa model yang termasuk model ini dengan memberi konteks pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Model belajar tuntas, pembelajaran langsung, dan teori belajar sosial “*Master Learning, Direct Instruction, and Social Learning Theory*”.
2. Model belajar kontrol diri “*Learning Self-Control*”.
3. Model latihan ketrampilan dan pengembangan konsep “ *Training for Skills and Concept Development*”.
4. Model latihan Asertif “*Assertive Training*”.

Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil (dalam Abdul Aziz Wahab 2007: 59) ada 4 modifikasi tingkah laku model pembelajaran, yaitu :

1. Model Interaksi Sosial

Model ini menunjukkan pentingnya hubungan sosial yang berkembang pada proses interaksi sosial diantara individu. Model

interaksi sosial adalah dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masyarakat dengan memperbaiki-memperbaiki hubungan interpersonal melalui prosedur demokrasi.

2. Model Pengolahan Informasi

Model-model tersebut menekankan pada cara siswa memperoleh informasi. Tujuan utama dari model-model kategori ini adalah membantu siswa mengembangkan metode atau cara-cara memproses informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Model-model ini juga menjelaskan cara memproses informasi dengan pendekatan yang berbeda.

3. Model Personal Humanistic

Model-model dalam kelompok ini memusatkan perhatiannya pada individu dan kebutuhannya. Individu dibantu melalui upaya menciptakan lingkungan yang merangsang agar individu tersebut merasa nyaman untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mengembangkan kemampuannya sampai pada tingkat yang optimum bagi kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan model-model tersebut berusaha memahami sifat-sifat individu guna meningkatkan pribadi dan kemampuannya serta menghubungkan dengan hal-hal produktif lainnya.

4. Model Modifikasi Tingkah Laku

Menurut B.F Skinner perilaku itu adalah sesuatu yang dialami dan sah yang dipengaruhi variabel-variabel eksternal tersebut. Tugas guru dalam model ini adalah menetapkan perilaku yang kompleks dan

menempatkan perilaku kelas tersebut di bawah pengendalian gambaran khusus lingkungan.

Sedangkan menurut Joice dan Weil model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang) merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.

Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran adalah pola atau strategi yang dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibuat oleh guru. Dari beberapa model yang telah diuraikan di atas, dapat bahwa semua model penanaman nilai moral seperti dijelaskan di atas dapat dijadikan alternatif dan dapat digunakan pada tingkat SMP sebagai pilihan dalam proses pembelajaran PKn, hanya saja dalam tataran pelaksanaan di kelas disesuaikan dengan jenjang dan karakteristik peserta didik, kebutuhan siswa.

D. Konsep Nilai

1. Pengertian Nilai

Sesuatu yang dianggap benar, baik, dihormati, dihargai, diharapkan dan senantiasa dicita-citakan keberadaannya adalah nilai. Setiap individu ataupun masyarakat mempunyai nilai yang berbeda-beda. Suatu nilai dapat terwujud apabila dilaksanakan melalui seperangkat aturan, kaidah ataupun hukum yang harus ditaati oleh individu ataupun masyarakat demi tercapainya suatu nilai yang diharapkan.

Pengertian nilai dikemukakan oleh Pepper (1958:7) yang dikutip oleh Munandar Soelaeman (2005: 35) “nilai adalah segala sesuatu tentang yang baik atau yang buruk, sedangkan menurut Perry (1954) dikutip oleh Munandar Soelaeman (2005: 35) mengatakan bahwa “nilai adalah segala sesuatu yang menarik bagi manusia sebagai subjek”.

Kluckhohn (1951: 399) dalam Munandar Soelaeman (2005: 35) mengemukakan bahwa :

”definisi nilai yang diterima sebagai konsep yang diinginkan dalam literatur ilmu sosial adalah hasil pengaruh seleksi perilaku. Batasan nilai yang sempit adalah adanya suatu perbedaan penyusunan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan dengan apa yang seharusnya dibutuhkan; nilai-nilai tersusun secara hierarkis dan mengatur rangsangan kepuasan hati dalam mencapai tujuan kepribadiannya. Kepribadian dari sistem sosio-budaya merupakan syarat dalam susunan kebutuhan rasa hormat terhadap keinginan yang lain atau kelompok sebagai suatu kehidupan sosial yang besar”.

Senada dengan Kluckhohn, menurut Munandar Soelaeman (2005: 35) “nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat”.

Robert M.Z.Lawang dalam Yukimanda (2010: 59) mendefinisikan bahwa “nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut”.

Dikemukakan pula oleh Hendropuspito dalam Yukimanda (2010:63) bahwa “nilai adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia”.

Berdasarkan beberapa pengertian nilai menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang abstrak, berharga dan berdaya guna sebagai petunjuk atau penuntun tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Klasifikasi atau Pembagaian Nilai

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian dan kesucian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih, sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil dan murah hati (Linda, 1995) dalam Zaim Elmubarak (2008: 7).

Sutrisno (1993: 87) dalam Munandar Soelaeman, (2005: 32) mengemukakan klasifikasi mengenai nilai adalah sebagai berikut:

1. Nilai Intrinsik (*Ontologis*)

Nilai intrinsik yaitu harga yang dipandang vital, penting, demi adanya si benda/hal tersebut. Misalnya, dinamo untuk mobil. Nilai intrinsik ini, di dalam adalah unsur utilitas (kegunaan), kepentingan, dan penilaian hal yang mewakilinya.

2. Nilai ekstrinsik

Nilai ekstrinsik adalah kualitas bagi suatu hal yang dipandang berguna, perlu, menarik demi kelangsungan adanya yang lain.

Misalnya, obat merupakan nilai ekstrinsik bagi orang yang sakit. Dimensi nilai ekstrinsik adalah dimensi ekstensial hal-hal untuk ku (subjek). Nilai-nilai ekstrinsik masih bisa dibagi dalam (1) nilai dalam tindakan dengan nilai dalam potensi, (2) nilai natural (alami) dengan nilai budaya, dan (3) nilai ekonomi dengan nilai spiritual.

J. De Finance (filsuf Perancis) juga membagi nilai-nilai berdasarkan kaitannya dengan aspek spritual manusia. Menurut De Finance, semakin tinggi dan baik salah satu nilai, semakin berkaitan ia dengan aspek spritual manusia yang lebih tinggi (Munandar Soelaeman, 2005: 34).

Adapun klasifikasi nilai menurut De Finance dalam Munandar Soelaeman (2003: 34) adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pra-manusiawi (pra-hukum)

Yang berlaku untuk manusia tetapi tak membuatnya manusiawi (nilai-nilai hedonis dan biologis).
2. Nilai-nilai manusiawi pra-moral (human value pra-moral)

Berkaitan dengan kepentingan sosial atau kultural yaitu: nilai-nilai ekonomis, intelektual, nilai-nilai estetis.
3. Nilai-nilai moral (*moral values*)

Meliputi nilai-nilai yang merupakan tindak pelaksanaan kebebasan dalam realisasinya terhadap kewajiban (duty) dan kebaikan.
4. Nilai-nilai spiritual dan religius: nilai-nilai dalam lingkup yang “suci” dan “Tuhan”.

Erich Fromm dalam Munandar Soelaeman (2005: 34) membagi nilai dalam dua ringkasan padat yaitu:

1. Nilai-nilai ekonomis

Yang menyangkut dunia atau lingkup “*having*” (pemilikan) : keberadaan di dunia dengan kecenderungan mau memiliki semua.
2. Nilai-nilai entitatif

Yang menyangkut dunia *being*. Nilai-nilai ini didasari demi eksistensi sama dengan being sebagai ruang keberadaan di dunia dengan nilai-

nilai yang mengembangkan pribadi (Erich Fromm, *Having or Being*. 1977).

Klasifikasi lain mengenai nilai dalam Munandar Soelaeman (2005: 34) adalah sebagai berikut:

1. Nilai mutlak: berlaku untuk semua orang, umum, diikuti oleh semua.
2. Nilai relatif: yang tidak berlaku untuk semua, namun hanya berlaku untuk beberapa kebudayaan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai klasifikasi atau pembagian nilai, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi dari nilai yaitu nilai-nilai nurani, nilai-nilai memberi, nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, nilai-nilai pra-manusiawi, nilai-nilai manusiawi pra-moral, nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual dan religious, nilai entitatif, nilai ekonomis, nilai mutlak, dan nilai relatif.

3. Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Nilai

Sukidin, Basrowi, dan Agus Wijaya (2003: 9-10) mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat terdapat prinsip-prinsip untuk pemilihan nilai, yaitu sebagai berikut:

Pertama, nilai intrinsik harus mendapat prioritas pertama daripada nilai ekstrinsik. Sesuatu yang berharga intrinsik yaitu yang baik dari dalam dirinya sendiri dan bukan karena menghasilkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang berharga secara ekstrinsik, yaitu sesuatu yang bernilai baik karena sesuatu hal dari luar. Jika sesuatu itu menjadi sarana untuk mendapat sesuatu yang lain. Semua benda yang bisa digunakan untuk aktivitas mempunyai nilai ekstrinsik. Kedua nilai ini tidak harus terpisah. Suatu benda dapat bernilai intrinsik dan ekstrinsik. Contoh pengetahuan, mempunyai nilai intrinsik baik dari dirinya sendiri dan mempunyai nilai ekstrinsik apabila digunakan untuk kepentingan pembangunan baik bidang ekonomi, politik, hukum, maupun bidang-bidang lainnya.

Kedua, nilai yang produktif secara permanen didahulukan daripada nilai yang produktif kurang permanen. Beberapa nilai seperti nilai ekonomi

akan habis dalam aktivitas kehidupan. Sedangkan nilai persahabatan akan bertambah jika dipergunakan untuk membagi nilai akal dan jiwa bersama orang lain. Oleh karena itu, nilai persahabatan harus didahulukan daripada nilai ekonomi.

4. Kualitas Nilai

Robin M. Williams (1972) dalam Munandar Soelaeman (2005: 36)

mengemukakan bahwa ada empat buah kualitas tentang nilai-nilai yaitu:

1. Nilai-nilai mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan dengan hanya sekadar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Dalam hal ini, nilai dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.
2. Nilai-nilai menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosi. Emosi di sini mungkin diungkapkan sebenarnya atau merupakan potensi.
3. Nilai bukan merupakan tujuan konkret dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan, sebab nilai-nilai berfungsi sebagai kriteria dalam memiliki tujuan-tujuan. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
4. Nilai-nilai merupakan unsur penting, dan tidak dapat disepelekan bagi orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan, nilai-nilai berhubungan dengan pilihan, dan pilihan merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.

Nilai-nilai sering dikacaukan dengan keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan dapat berisi kepercayaan-kepercayaan bahwa suatu argumentasi sungguh-sungguh dianggap benar. Keyakinan tidak memerlukan bukti empiris. Keyakinan adalah pikiran-pikiran tentang hal-hal yang dipandang sebagai faktor-faktor, dan orang-orang yang mengetahuinya tak akan berani menentanginya. Nilai-nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh atau tidak boleh. Pengertian keyakinan dapat digambarkan dengan kecendrungan

terhadap apa-apa yang disukai dan apa-apa yang tidak disukai (Alvin L. Bertrand, 1967) dalam Munandar Soelaeman (2005: 36).

5. Jenis dan Tingkatan Nilai

Jenis-jenis nilai menurut intensitasnya dikemukakan oleh Munandar Soelaeman, (2005: 37) adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang tercernakan (*internalized values*)

Nilai ini merupakan suatu landasan bagi reaksi yang diberikan secara otomatis terhadap situasi-situasi tingkah laku eksistensi. Nilai yang tercernakan ini tidak dapat dipisahkan dari si individu dan dapat membentuk landasan bagi hati nurani. Nilai yang tercernakan bagi individu-individu artinya individu itu menghayati atau menjiwai suatu nilai sehingga ia akan memandang keliru pola pikir yang tidak sesuai dengan nilai tersebut.

2. Nilai-nilai yang dominan

Nilai-nilai yang dominan artinya nilai-nilai yang lebih diutamakan daripada nilai-nilai lain. Fungsi nilai dominan ialah sebagai suatu latar belakang atau kerangka patokan bagi tingkah laku sehari-hari.

Kriteria apakah suatu nilai itu dominan, ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Luas-tidaknya ruang lingkup pengaruh nilai tersebut dalam aktivitas total dari sistem sosial.
- b. Lama-tidaknya pengaruh nilai itu dirasakan oleh kelompok masyarakat.
- c. Gigih-tidaknya (intensitas) nilai tersebut diperjuangkan atau dipertahankan.
- d. Prestise orang-orang yang menganut nilai, yaitu orang atau organisasi-organisasi yang dirancang sebagai pembawa nilai.

Adapun tingkatan-tingkatan nilai, menurut Arnold Green dalam Munandar Soelaeman, (2005: 37) ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Perasaan (sentimen) yang abstrak
2. Norma-norma moral, dan
3. Keakuan (kepribadian)

Ketiga tingkatan tersebut ditemukan di dalam kepribadian seseorang. Perasaan dipakai sebagai suatu landasan bagi orang-orang untuk membuat putusan dan sebagai standar untuk tingkah laku. Demikian pula norma-norma moral. Merupakan standar tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (*frame of reference*) dalam berinteraksi. Adapun keakuan diri berperan dalam membentuk kepribadian melalui proses pengalaman sosial.

E. Penilaian

Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah *assessment*, bukan dari istilah *evaluation*. Depdikbud (1990) mengemukakan “penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa.” Kata “menyeluruh” mengandung arti bahwa penilaian tidak hanya ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai.

2. Penilaian atau asesmen

Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu (Griffin & Nix, 1991) dalam Purnomo Edy (2015: 8). Penilaian mencakup semua proses pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah.

Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Penilaian merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan ditafsirkan. Karenanya, menurut Cangelosi (1995), dalam Purnomo Edy (2015: 8). Penilaian adalah keputusan tentang nilai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah peserta didik menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Hasil jawaban peserta didik tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai.

Kellough dan Kellough dalam (Arifin 2011), mengidentifikasi tujuan penilaian adalah untuk: (1) membantu belajar peserta didik, (2) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, (3) menilai efektivitas strategi pengajaran, (4) menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, (5) menilai dan meningkatkan efektivitas pengajaran, (6) menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan, dan (7) komunikasi dan melibatkan orang tua peserta didik. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Weeden, et al (2002), mengklasifikasi tujuan penilaian dalam empat hal, yaitu untuk diagnostik (untuk mengidentifikasi kinerja peserta didik), formatif (untuk membantu belajar peserta didik), sumatif (untuk revaluasi, transfer, dan sertifikasi), dan evaluatif (untuk melihat bagaimana kinerja guru atau institusi). Menurut Rasyidin dan Mansur (2009), dalam Purnomo Edy (2015: 7). kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada empat hal, yaitu:

- a. Penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Untuk kepentingan ini, pendidik mengumpulkan berbagai informasi sepanjang semester atau tahun pelajaran melalui berbagai bentuk pengukuran untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik.
- b. Pengecekan, yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan melakukan berbagai bentuk pengukuran, pendidik berusaha untuk

memperoleh gambaran menyangkut kemampuan peserta didiknya, apa yang telah berhasil dikuasai dan apa pula yang belum.

- c. Pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan-kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan jalan ini pendidik dapat segera mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama proses belajar berlangsung.
- d. Penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian belajar yang telah dimiliki peserta didik. Hal ini sangat penting bagi pendidik untuk mengetahui tingkat pencapaian yang diperoleh peserta didik. Selain itu, hasil penyimpulan ini dapat digunakan sebagai laporan hasil tentang kemajuan belajar peserta didik, baik untuk peserta didik sendiri, sekolah, orang tua, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Gabel (1993), dalam Edy Purnomo (2015: 8). mengategorikan asesmen ke dalam dua kelompok besar, asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen yang tergolong tradisional adalah tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Sementara itu yang tergolong ke dalam asesmen alternatif adalah: penilaian praktik, penilaian proyek, kuesioner, inventori, daftar cek, penilaian oleh teman sebaya/sejawat, penilaian diri (self assessment), portofolio, observasi, diskusi dan interviu (wawancara).

Ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan, kegiatan penilaian merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik profesional. Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu

indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan.

F. Pengertian Perencanaan Pembelajaran

Memahami definisi Perencanaan Pembelajaran dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) "bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan (merancang), sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.

Sedang Hamzah B. Uno (2009: 13) "menjelaskan perencanaan sebagai suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sehingga, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah dengan mempersiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan pengertian perencanaan pembelajaran, para ahli memiliki pendapat berlainan meskipun memiliki tujuan yang sama, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem yang berisi prosedur untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan *reliable*.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama, tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dari pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pengembangan perilaku dalam bidang kognitif adalah pengembangan kemampuan intelektual siswa, misalnya kemampuan penambahan pemahaman, dan informasi agar pengetahuan menjadi lebih baik. Pengembangan perilaku dalam bidang afektif adalah pengembangan sikap siswa terhadap bahan dan proses pembelajaran, maupun pengembangan sikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pengembangan perilaku dalam bidang psikomotor adalah pengembangan kemampuan menggunakan otot atau alat tertentu, maupun menggunakan potensi otak untuk memecahkan permasalahan tertentu.

Dari pengertian perencanaan dan pembelajaran yang telah diuraikan di atas, maka juga dapat disimpulkan pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Menurut Rukhiyat, Adang (2003: 26) dapat diketahui bahwa perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, artinya suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh, dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran.
2. Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga ketercapaian tujuan merupakan fokus utama dalam perencanaan pembelajaran.
3. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang akan diajarkan pada siswa, bagaimana cara mengajarkannya, dan seberapa baik siswa dapat menyerap semua bahan ajar ketika siswa telah menyelesaikan proses pembelajarannya. Perencanaan tersebut sangat penting bagi guru karena kalau tidak ada perencanaan yang baik, tidak hanya siswa yang akan tidak terarah dalam proses belajarnya tapi guru juga tidak akan terkontrol, dan bisa salah arah dalam proses belajar yang dikembangkannya pada siswa. Berkaitan dengan fungsi perencanaan pembelajaran,

Pendapat Hamalik Oemar (2004: 35) bisa dijadikan sebagai acuan, yakni;

- 1) Memberi guru pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan sekolah, dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan.
- 3) Mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikuler yang baik, metode yang tepat dan hemat waktu.
- 4) Murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka.
- 5) Memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya.
- 6) Membantu guru memiliki perasaan percaya diri pada diri sendiri dan jaminan atas diri sendiri.
- 7) Sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan pengertian-pengertian perencanaan pembelajaran di atas dapat ditarik suatu penegasan, bahwa perencanaan pembelajaran adalah sebagai kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah

ditetapkan. Sementara dalam prakteknya, pengembangan perencanaan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip sehingga proses yang ditempuh dapat dilaksanakan secara efektif, diantara prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas, makin konkrit kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut.
- 2) Perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi siswa
- 3) Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
- 4) Perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.

Lebih jauh Hamalik Oemar (2004: 56) menyoroti hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pembelajaran, yakni:

- 1) Rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber.
- 2) Organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekolah.
- 3) Guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksiswaan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

G. Model Pembelajaran VCT

a. Pengertian VCT

Value Clarification Technique, (VCT) adalah salah satu model pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Djahiri (1979: 115) mengemukakan bahwa *Value Clarification Technique*, merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali/ mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada prosesnya *Value Clarification Technique*, (VCT) berfungsi untuk: *a*) mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai; *b*) membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang positif maupun yang negatif untuk kemudian dibina kearah peningkatan atau pembetulannya; *c*) menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya. Dengan kata lain, Djahiri (1979: 116) menyimpulkan bahwa *Value Clarification Technique* diharapkan dapat melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai, mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian dilaksanakannya sebagai warga masyarakat.

Model pembelajaran yang mengklarifikasi nilai (*value clarification technique*) atau sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Pola pembelajaran VCT, menurut A. Kosasih Djahiri (1992), dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena; pertama, mampu membina dan

memprabadikan nilai dan moral; kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan; ketiga mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata; keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi afektualnya; kelima, mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan; keenam, mampu menangkal, meniadakan mengintervensi dan menyubversi berbagai nilai moral yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang; ketujuh, menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi.

Menurut A. Kosasih Djahiri (1985) model pembelajaran VCT meliputi: metode percontohan, analisis nilai, daftar/matriks, kartu keyakinan, wawancara, yurisprudensi dan teknik inkuiri nilai. Selain itu, dikenal juga dengan metode bermain peran, diskusi, curah pendapat. Metode dan model di atas dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn, karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap dan prilaku siswa, disamping membina kecerdasan (*knowledge*) siswa.

b. Tujuan Model Pembelajaran VCT

Jarolimek (1974: 40) menjelaskan tujuan dari pembelajaran dengan *Value clarification technique* (VCT) sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai.

2. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk kemudian dibina ke arah peningkatan dan pembentukannya.
3. Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa.
4. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap sesuatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat.

c. Langkah – Langkah Pembelajaran VCT

John Jarolimek (1974: 35) menjelaskan langkah pembelajaran dengan *Value clarification technique* (VCT) dalam 7 tahap yang dibagi ke dalam 3 tingkat, setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kebebasan Memilih, Pada tingkat ini terdapat 3 tahap, yaitu: (1) Memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara penuh; (2) Memilih dari beberapa alternatif. Artinya, untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas; (3) Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya.
2. Menghargai, Terdiri atas 2 tahap pembelajaran, yaitu; (1) Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian dari dirinya; (2) Menegaskan nilai yang

sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Artinya, bila kita menggagap nilai itu suatu pilihan, maka kita akan berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkannya di depan orang lain.

3. Berbuat, Pada tahap ini, terdiri atas 2 tahap, yaitu; (1) Kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya (2) Mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan VCT melalui proses dialog yaitu :

1. Hindari penyampaian pesan melalui proses pemberian nasihat, yaitu memberikan pesan-pesan moral yang menurut guru dianggap baik.
2. Jangan memaksa siswa untuk memberi respons tertentu apabila memang siswa tidak menghendakinya.
3. Usahakan dialog dilaksanakan secara bebas dan terbuka, Sehingga siswa akan mengungkapkan perasaannya secara jujur dan apa adanya.
4. Dialog dilaksanakan kepada individu, bukan kepada kelompok kelas.
5. Hindari respons yang dapat menyebabkan siswa terpojok, sehingga ia menjadi defensif.
6. Tidak mendesak siswa pada pendirian tertentu.
7. Jangan mengorek alasan siswa lebih dalam.

Sistem pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan model pembelajaran VCT Sistem pendukung adalah penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di kelas. Sistem pendukung yang

diperlukan untuk melaksanakan model pembelajaran VCT adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya perpustakaan yang dapat mendukung proses pembelajaran.
2. Adanya sumber belajar yang lain dan narasumber yang dapat dimanfaatkan oleh siswa

d. Kelebihan Model Pembelajaran VCT

Kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran VCT siswa lebih dapat aktif, mengerti tujuan dan serta arah pembelajaran yang akan di capai dan dapat mengungkapkan perasaannya secara jujur dan apa adanya. Selain itu siswa akan tercipta suasana dialog yang terlaksana secara bebas dan terbuka. Dengan demikian siswa akan bereksplorasi dengan mencari informasi dari berbagai sumber untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya tahu dan mengerti nilai-nilai yang terkandung dan yang dibahas dalam proses pembelajaran namun, siswa juga dibelajarkan bagaimana menggunakan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

e. Kelemahan Model Pembelajaran VCT

Kelemahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran nilai atau sikap adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru, artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memerhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru.

H. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat , dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara , beragama , berpendapat , berserikat setiap warga negara, menegakkan *rule of law* , adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak .

Demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* dan *kratos*. *Demos* mempunyai arti rakyat, dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara keseluruhan demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Menurut John Dewey dalam Rostitawati (2014:137) Tata susunan masyarakat yang dapat menampung individu yang memiliki efisiensi di atas adalah sistem demokrasi yang didasarkan atas kebebasan, asas saling menghormati kepentingan bersama, dan asas ini merupakan sarana kontrol sosial.

Mengenai konsep demokrasi dalam pendidikan, Dewey berpendapat bahwa dalam proses belajar siswa harus diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Siswa harus aktif dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh

guru. Begitu pula, guru harus menciptakan suasana agar siswa senantiasa merasa haus akan pengetahuan.

Karena pendidikan merupakan proses masyarakat dan banyak terdapat macam masyarakat, maka suatu kriteria untuk kritik dan pembangunan pendidikan mengandung cita-cita utama dan istimewa. Masyarakat yang demikian harus memiliki semacam pendidikan yang memberikan interes perorangan kepada individu dalam hubungan kemasyarakatan dan mempunyai pemikiran yang menjamin perubahan perubahan sosial.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, Hasbullah (2006: 49-51) mengintegrasikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki sebelas pilar, yakni:

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan Hak Asasi Manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Hasbullah (2006: 49-51) mengemukakan demokrasi dalam pengertian lebih luas, patut dianalisa sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut :

a. Rasa Hormat terhadap Harkat Sesama Manusia

Dalam hal ini demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur,

warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati.

b. Setiap Manusia Memiliki Perubahan ke Arah Pikiran yang Sehat

Acuan inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu haruslah dididik. Dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang kearah yang lebih sehat dan baik serta sempurna. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan sekolah diharapkan dapat mengembangkan anak didik untuk berfikir dan memecahkan persoalan-persoalan sendiri secara teratur, sistematis dan komperhensif serta kritis sehingga anak memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini diperlukan sikap yang demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain.

c. Rela Berbakti untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama

Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Norma-norma atau aturan serta tata nilai yang terdapat di masyarakat itulah yang membatasi dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Untuk itu, warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati. Artinya tiap-tiap warga negara hendaklah memahami kewajibannya

sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara dari suatu negara demokratis yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Berkenaan dengan itulah maka bagi setiap warga negara diperlukan hal-hal berikut ini :

- a. Pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan, kemasyarakatan, dan soal-soal pemerintahan yang penting.
- b. Suatu keinsyafan dan kesanggupan semangat menjalankan tugasnya, dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia.
- c. Suatu keinsyafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah.

Yang paling utama dalam berlakunya demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi, yaitu ;

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah, jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Menurut Pidie (1986:61) menuraikan makna demokrasi yang didekati dari arti formal adalah sebagai suatu sistem politik atau sistem pemerintahan dimana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, melainkan

melalui wakil-wakil yang dipilihnya dilembaga perwakilan. Sedangkan dalam arti materiel disebut demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa sehingga dikenal demokrasi konstutusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila.

Alamudi (1991:33) menjelaskan bahwa demokrasi, sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk dari sejarah panjang dan berliku-liku serta demokrasi merupakan pelembagaan dari kebebasan.

Menurut M. Durverger (1954:45), demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan, dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu sama dan tidak terpisah-pisah.

Dari berbagai pengertian demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa demokrasi menekankan adanya prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan yang dilandasi oleh norma-norma atau aturan yang berlaku. Dan disamping itu bahwa demokrasi merupakan konsep yang memiliki makna dan ciri-ciri dasar yang bersifat universal atau berlaku secara umum. Namun dalam penerapannya setiap negara memiliki kekhasan masing-masing. Penerapan demokrasi dalam suatu negara, bergantung kepada 1). idiologi dan falsafahyang dianutnya, 2). sistem nilai budaya yang dianutnya, 3). karakteristik masyarakatnya dan 4). sejarah kehidupan bangsa dan negaranya. Oleh karena hal tersebutlah sehingga yang menjadi dasar penerapan demokrasi di berbagai negara itu memiliki ciri khas masing-masing seesuai dengan karakter bangsa dan negaranya tersebut.

I. Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini diungkapkan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan berkaitan dengan pokok masalah. Hasil penelitian tersebut antara lain.

Tabel 2.1. Penelitian Relevan Berdasarkan Jurnal Nasional

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Analisis
1.	Ragwan	Peningkatan Belajar PKn Melalui Model Pembelajaran <i>Value Clarification Technique</i> (VCT) Percontohan pada Siswa Kelas I SD Karya Thayyibah Baiya	Hasil penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran VCT Percontohan pada mata pelajaran PKn materi Berperilaku Mulia Sesuai Pancasila dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa di kelas, dan performansi guru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti model pembelajaran <i>Value Clarification Technique</i> (VCT) yang diterapkan lebih tinggi karena subyek penelitian merupakan siswa SMP.
2.	Sri Wijianti	Penerapan Model <i>Value Clarification Technique</i> (Vct) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Pkn Materi Nilai Kebersamaan Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Bagi Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri Wirogunan 03 Kartasura Tahun Pelajaran 2014/2015	Hasil penelitian ini adalah, 1) Penerapan model <i>Value Clarification Technique</i> (VCT) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa pada setiap siklus tindakan yang dilakukan; dan 2) Penerapan model <i>Value Clarification Technique</i> dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi Nilai Kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara bagi siswa kelas VI semester I SD Negeri Wirogunan 03 Kartasura tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar dan tingkat ketuntasan belajar siswa pada setiap siklus tindakan yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lebih menekankan pada peningkatan nilai-nilai demokrasi sehingga hasil penelitian berupa

			kecenderungan sikap cukup baik, baik, dan sangat baik.
3.	Putra Wahyu Perdana	Peningkatan Hasil Belajar Pkn Melalui Model Pembelajaran <i>Value Clarification Technique (VCT)</i> Pada Siswa Kelas VA SD Muhammadiyah 10 Tipe Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012	Hasil penelitian ini adalah Penerapan model <i>Value Clarification Technique (VCT)</i> dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lebih menekankan pada peningkatan nilai-nilai demokrasi sehingga hasil penelitian berupa kecenderungan sikap cukup baik, baik, dan sangat baik sedangkan pada penelitian tersebut hasil belajar siswa diketahui berdasarkan nilai (angka).
4.	Adelina Hasyim		Hasil penelitian Adelina Hasyim, (2009: 5) Sukses dalam melaksanakan pembelajaran dipengaruhi bagaimana seorang guru mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik. Jika guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, berarti guru tersebut telah membantu siswa terlibat dalam proses pembelajaran, dan mampu menjadi siswa yang dapat mencari, mengolah dan memiliki kompetensi yang menjadi tujuan belajarnya. Model pembelajaran melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu proses pembelajaran yang bersumber dari suatu model pembelajaran merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. Dengan penerapan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disajikan dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik siswa maka tujuan pembelajaran dan harapan dari guru akan tercapai dengan maksimal.
5.	Henni Setyo	Penerapan Model	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Rahayu	Pembelajaran <i>Value Clarification Technique (VCT)</i> untuk Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia pada mata pelajaran PPKn di Kelas XI SMA Negeri 1 Bandar Sribawono	penerapan model <i>Value Clarification Technique (VCT)</i> dapat menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti lebih menekankan pada peningkatan nilai-nilai demokrasi.
--	--------	--	---

Tabel 2.2. Penelitian Relevan Berdasarkan Jurnal Internasional

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Analisis
1.	Andrew J. Martin	The Relationship Between Teachers' Perceptions Of Student Motivation And Engagement And Teachers' Enjoyment Of And Confidence In Teaching	Hasil penelitian ini adalah adanya hubungan persepsi guru tentang motivasi belajar dan kepercayaan guru mengajar. Perbedaan penelitian ini menekankan pembentukan motivasi siswa yang dipengaruhi oleh cara guru mengajar.
2.	Begoña Gros	The Dialogue Between Emerging Pedagogies and Emerging Technologies	Hasil penelitian ini adalah sarana dan prasarana sangat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu model pembelajaran, dan metode yang dipakai guru juga mempengaruhi proses serta keberhasilan hasil belajar siswa.
3.	Dr. Roli Rai	Comparative Effectiveness of Value Clarification and Role Playing Value Development Models for Selected	Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat efektifitas kegiatan klarifikasi nilai dalam bidang pendidikan. Dari berbagai macam nilai pembangunan model dua model yang tampaknya sesuai dengan inculcating diinginkan nilai dalam siswa dan yang layak cukup untuk pelaksanaan luas adalah nilai klarifikasi dan model bermain peran. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan

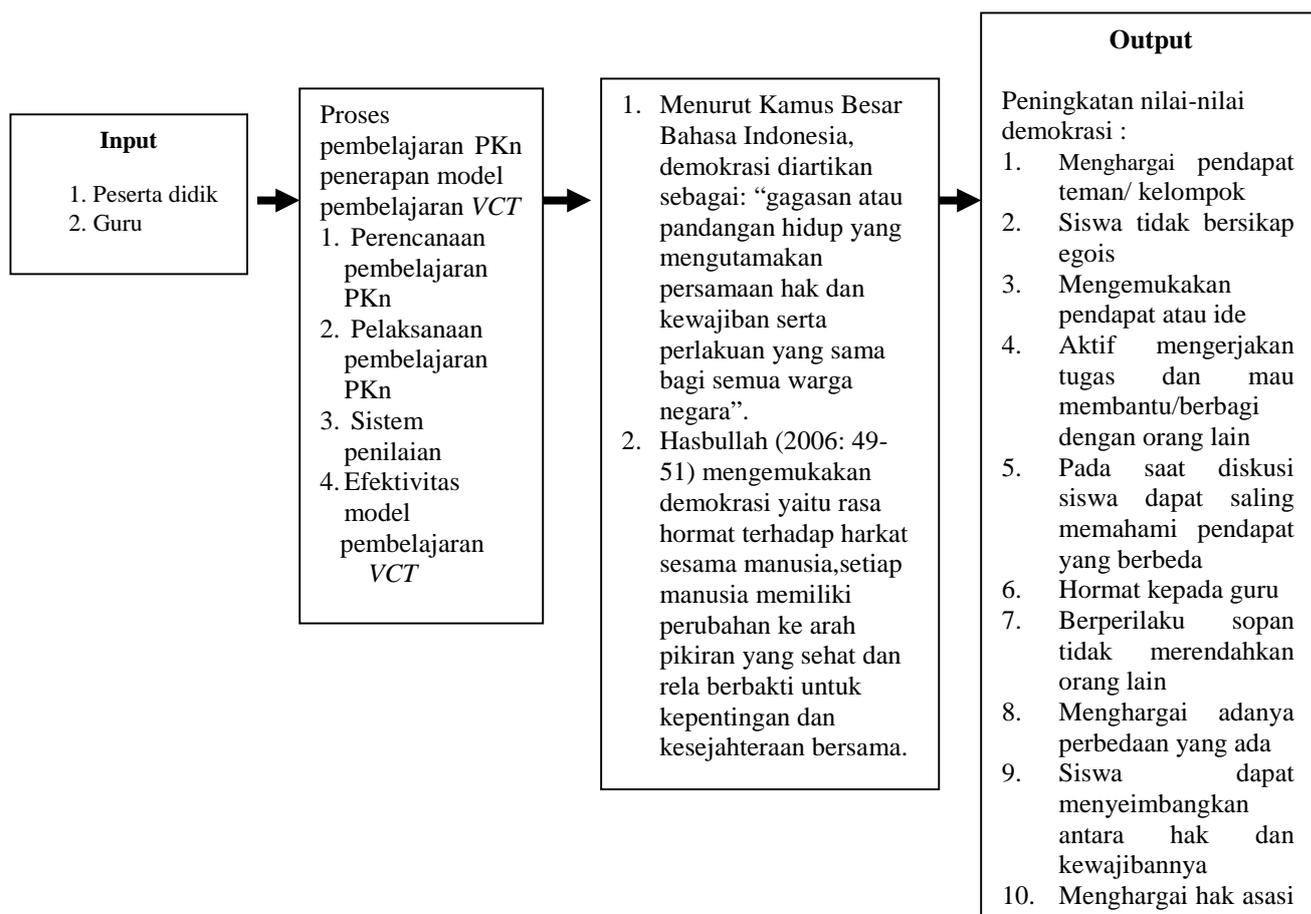
		Values for Primary School Students	oleh peneliti adalah lebih pada peningkatan nilai-nilai demokrasi.
4.	Meher Rizvi	The Role of School Principals in Enhancing Teacher Professionalism	Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peran sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dalam membangun profesionalisme guru tersebut diketahui bahwa nilai-nilai kepemimpinan sangat mempengaruhi Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah lebih pada peningkatan nilai-nilai demokrasi.
5.	Chun-Mei Zhao	Adding Value: Learning Communities and Student Engagement	Abstrak penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara berpartisipasi dalam belajar masyarakat dan mahasiswa kerja sama pada berbagai kegiatan educationally tujuan first-year dan senior siswa dari lembaga 365 4-year. Temuan menunjukkan bahwa berpartisipasi dalam belajar masyarakat secara positif terkait dengan kerja sama juga sebagai siswa self-reported hasil dan secara total kepuasan terhadap perguruan tinggi. Belajar masyarakat mahasiswa siswa pembangunan siswa kerja sama praktik integrative belajar efektif pendidikan

J. Kerangka Pikir

Value Clarification Technique, merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali/ mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri siswa. Karena itu, pada prosesnya, VCT berfungsi untuk: *a)* mengukur atau mengetahui pemahaman siswa tentang suatu nilai; *b)* membina siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang positif maupun yang negatif untuk kemudian dibina kearah peningkatan atau pembetulannya; *c)* menanamkan

suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya.

Kerangka pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau *Class Room Action Research* adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar, sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas secara bersama (Arikunto, 2007: 3).

Penelitian ini akan dilakukan untuk menguji cobakan suatu model pembelajaran yaitu model pembelajaran *Value Clarification Technique* dalam peningkatan nilai-nilai demokrasi kepada siswa Kelas VIII SMPN 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Dalam penggunaan model pembelajaran *Value Clarification Technique*, ini peneliti berusaha untuk mencari pengaruh yang terjadi dalam pelaksanaan model pembelajaran *Value Clarification Teknik* terhadap peningkatan nilai-nilai demokrasi kepada siswa.

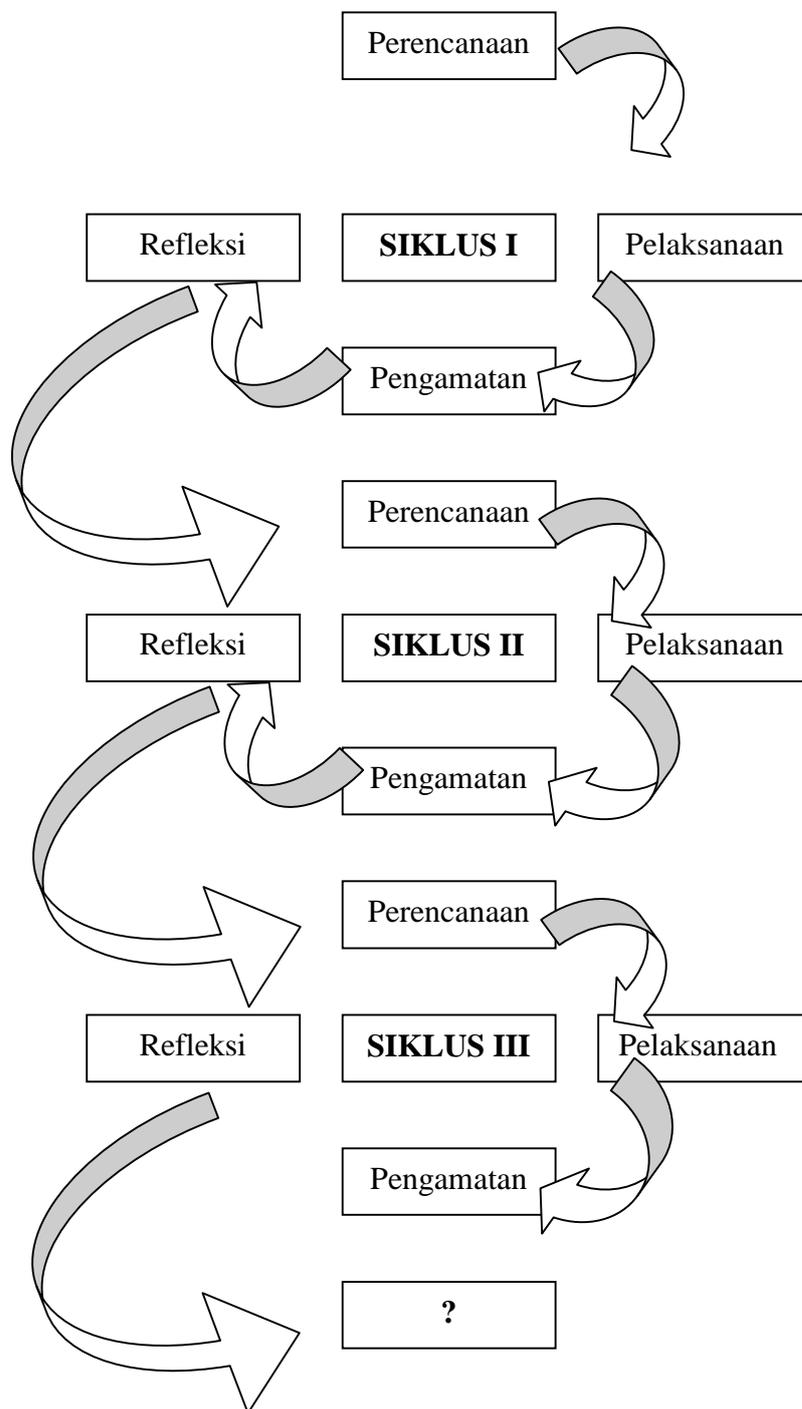
B. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bersifat siklus dan terdiri dari empat rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang.

Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu

- a. Planning*
- b. Acting*
- c. Observasi dan*
- d. Reflecting*

Sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robbin Mc Taggart dalam Arikunto (2006: 16) Rangkaian rencana penelitian tindakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian Tindakan (Arikunto , 2006: 16)

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat siklus. Prosedur kerja dalam penelitian ini dirancang dalam siklus- siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yang harus dijalani, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Rencana dalam tindakan kelas ini minimal dua siklus dan diharapkan sudah mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan. Pada Siklus I keberhasilan perencanaan pembelajaran diharapkan mencapai 50%.

2. Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

1. Kebebasan Memilih, Pada tingkat ini terdapat 3 tahap, yaitu: (1) Memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara penuh; (2) Memilih dari beberapa alternatif. Artinya, untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas; (3) Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya.
2. Menghargai, Terdiri atas 2 tahap pembelajaran, yaitu; (1) Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian dari dirinya; (2) Menegaskan nilai yang sudah

menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Artinya, bila kita menggagap nilai itu suatu pilihan, maka kita akan berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkannya di depan orang lain.

3. Berbuat, Pada tahap ini, terdiri atas 2 tahap, yaitu; (1) Kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya (2) Mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

3. Observasi

Tahap ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan peneliti bersama observer pendamping untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan guru dalam penerapan model pembelajaran dan aktivitas belajar siswa. Observasi (pengamatan) tersebut dilakukan untuk mengenali, merekam dan mengumpulkan data dari setiap indikator mengenai unjuk kerja siswa dalam proses pembelajaran.

4. Refleksi

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa. Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya. Analisis dilakukan untuk mengukur baik kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada siklus I, kemudian mendiskusikan hasil analisis secara kolaborasi untuk perbaikan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan siklus selanjutnya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIII SMPN 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2015/ 2016, yang berjumlah 36 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan skenario model pembelajaran yang telah dipersiapkan.

b. Angket

Angket disajikan pada waktu pelaksanaan diskusi antar kelompok, untuk mengetahui hasil belajar siswa. Untuk mengetahui hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat dari jumlah poin-poin yang diperoleh setiap anggota kelompok.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa data jumlah siswa, foto aktifitas pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan lembar penilaian.

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif integratif dengan tabel analisis reduksi data. Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan berbagai cara atau metode agar mendapatkan data yang

relatif konsisten yaitu menggunakan triangulasi metode pengumpulan data. Peneliti menggabungkan alat pengumpulan data misalnya observasi, angket, tes dan cara lain untuk mendapatkan data sejenis dengan demikian data yang kurang lengkap dan meragukan dapat dilengkapi dan diyakinkan dengan data lain dan dengan cara yang lain pula menurut Setiyadi (2002:56).

Penilaian peningkatan nilai-nilai demokrasi diambil dari pengamatan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Untuk melihat kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran digunakan instrumen sebagai berikut:

Penilaian Kemampuan Guru dalam Perencanaan Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran VCT .

No	Aspek Yang Dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1	Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar)				
2	Tahap Memilih 1. Memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan nilai yang menurutnya baik				
3	2. Memilih dari beberapa alternatif nilai yang telah ditentukan.				
4	3. Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya.				
5	Tahap Menghargai 4. Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya.				
6	5. Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum.				
7	Tahap Berbuat 6. Kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya				
8	7. Mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya.				
	Skor Total				

Dengan menggunakan kelas interval sebagai berikut:

No.	Interval	Kategori
1.	8 – 15	Tidak baik
2.	16 – 19	Cukup
3.	20 - 25	Baik
4.	26 - 32	Sangat baik

Sumber : (Arikunto , 2006: 16)

Untuk data penerapan Model pembelajaran VCT diambil dari pengamatan dalam kegiatan pembelajaran (pelaksanaan) melalui lembar observasi kegiatan guru atau penerapan Model pembelajaran VCT sebagai berikut :

**LEMBAR PENGAMATAN KEMAMPUAN GURU
MENGELOLA PEMBELAJARAN VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE**

Nama Guru :
 Nama Sekolah :
 Mata Pelajaran :
 Materi Pembelajaran :
 Hari/ Tanggal :

ASPEK PENGAMATAN	SKOR				
	KELAS				
	1	2	3	4	5
A. Pendahuluan					
1. Mengkondisikan siswa					
2. Menyampaikan SK, KD, serta tujuan pembelajaran					
3. Menggali pengetahuan awal siswa					
4. Memberikan motivasi kepada siswa					
Jumlah A					
B. Tahap Memilih					
1. Memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan nilai yang menurutnya baik					
2. Memilih dari beberapa alternatif nilai yang telah ditentukan					
3. Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya					
Jumlah B					
C. Tahap Menghargai					
4. Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai					

yang menjadi pilihannya					
5. Menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum.					
Jumlah					
C					
D. Tahap Berbuat					
6. Kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya					
7. Mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya.					
Jumlah					
D					
E. Menganalisis dan Evaluasi					
1. Membantu siswa mengkaji ulang proses pembelajaran					
2. Membimbing siswa yang belum mengerti dan paham					
Jumlah					
E					
F. Penutup					
1. Membimbing siswa membuat simpulan/ rangkuman materi					
2. Memberikan tugas kepada siswa berupa tugas kelompok dan individu					
3. Memberikan informasi rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya					
4. Melakukan evaluasi					
Jumlah F					
Total					

Borang 2012 (Panduan Instrumen Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran PLPG:2012)

Kategori

- 1) 0-45 = Sangat Kurang Baik (SKB)
- 2) 46-55 = Kurang Baik (KB)
- 3) 56-75 = Cukup Baik (CB)
- 4) 76-85 = Baik (B)
- 5) 86-100 = Sangat Baik (SB)

**INSTRUMEN PENILAIAN PENINGKATAN
NILAI-NILAI DEMOKRASI
KEPADA SISWA**

Nama Sekolah :
Mata Pelajaran :
Materi Pembelajaran :
Kelas :
Hari/ Tanggal :

Petunjuk!

Berilah tanda (v) *chek list* pada kolom yang disediakan!

No.	Aspek Yang Dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1.	Menghargai pendapat teman/ kelompok				
2.	Siswa tidak egois dengan pendapat sendiri				
3.	Mengemukakan pendapat atau ide				
4.	Aktif mengerjakan tugas dan mau membantu/berbagi dengan orang lain yang memerlukan bantuan				
5.	Pada saat diskusi siswa dapat saling memahami pendapat yang berbeda				
6.	Hormat kepada guru				
7.	Berperilaku sopan tidak merendahkan orang lain				
8.	Menghargai adanya perbedaan ide atau pendapat yang ada				
9.	Siswa dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya				
10.	Menghargai hak orang lain				

Tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

No.	Interval	Kategori
1.	10 - 17	Tidak baik
2.	18 – 25	Cukup
3.	26 – 33	Baik
4.	34 – 40	Sangat baik

Sumber : (Arikunto , 2006: 16)

Demikian juga untuk data aktivitas belajar siswa dengan menggunakan lembar observasi. Adapun kisi-kisi instrumen observasi pengamatan aktivitas belajar siswa adalah sebagai berikut :

**LEMBAR INSTRUMEN EFEKTIVITAS
PENINGKATAN NILAI-NILAI
DEMOKRASI SISWA**

Nama Guru :
Nama Sekolah :
Mata Pelajaran :
Materi Pembelajaran :

Petunjuk !

Berikan tanda cek list (v) pada kolom skor yang telah disediakan

No	Nama Peserta Didik	Aspek yang Diamati										Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Jumlah												
Rata-rata keaktifan (%)												
Katagori keaktifan siswa:												

Keterangan:

1. Menghargai pendapat teman/kelompok.
2. Siswa tidak bersikap egois
3. Mengemukakan pendapat atau ide
4. Aktif mengerjakan tugas dan mau membantu /berbagi dengan orang lain
5. Pada saat diskusi siswa dapat saling memahami pendapat yang berbeda
6. Hormat kepada guru
7. Berperilaku sopan tidak merendahkan orang lain
8. Menghargai adanya perbedaan
9. Siswa dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
10. Menghargai hak asasi orang lain

Kategori

- 1) 0-45 = Sangat Kurang Baik (SKB)
- 2) 46-55 = Kurang Baik (KB)
- 3) 56-75 = Cukup Baik (CB)
- 4) 76-85 = Baik (B)
- 5) 86-100 = Sangat Baik (SB)

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penelitian ini:

Setiap siswa diamati aktivitasnya secara klasikal dalam setiap pertemuan dengan memberi skor pada lembar observasi yang telah disediakan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Indikator siswa dikatakan aktif jika lebih dari atau sama dengan 75% frekuensi yang ditetapkan per-indikator dilakukan siswa. Setelah selesai diobservasi dihitung jumlah aktivitas yang dilakukan siswa, lalu dipresentasikan.

Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah adanya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi (*on task*) dimana $> 75\%$ dari seluruh siswa kelas VIII mencapai indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan kriteria keberhasilan guru dilihat dan ditentukan dari tingkat keberhasilan serta kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dengan kategori baik atau mencapai kategori sangat baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran *VCT* pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur tahun pelajaran 2015/ 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembelajaran dalam proses pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran *VCT* sangat penting meningkatkan nilai-nilai demokrasi. Perencanaan yang baik disusun dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan materi, kebutuhan dan karakteristik siswa dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas akan berdampak pada hasil akhir yang akan menjadi tujuan dari proses pembelajaran.
- 2) Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan model pembelajaran *VCT* dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran dengan tahapan yang runtut, sistematis dan terprogram meliputi pendahuluan, memilih, menghargai, berbuat, menganalisis dan evaluasi, penutup. Selain itu guru dapat menumbuhkan motivasi, menggali potensi siswa untuk menjadi lebih kreatif, serta dapat memiliki pertimbangan dan tingkat analisis nilai-nilai demokrasi yang baik dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Sistem penilaian pembelajaran PKn dengan model pembelajaran *VCT* dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan sehingga tujuan pembelajaran baik kognitif, efektif dan psikomotor nilai-nilai demokrasi dapat tercapai.
- 4) Efektivitas model pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran selama masa tindakan dari siklus 1 sampai pada siklus 3 model pembelajaran *VCT* sangat efektif dan dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa, hal tersebut dapat terlihat dari hasil yang diperoleh terus mengalami peningkatan dimana siswa lebih dapat aktif, mengerti tujuan dan arah pembelajaran yang akan dicapai dengan memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

- 1) Kepada guru SMP Negeri 2 Sukadana Kabupaten Lampung Timur harus dapat berkreaitivitas dalam menggunakan berbagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.
- 2) Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan baik berupa sarana dan prasarana maupun secara materil sehingga tercipta suasana proses pembelajaran yang lebih baik.
- 3) Kepada siswa hendaknya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bumi Aksara. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi VI)*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Abdurrahman, Mulyono. 2003. *Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 47 dan 49
- Ace Suryadi, Dasim Budimansyah. 2009. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional Konsep, Teori dan Aplikasi Dalam Analisis Kebijakan Publik*. Widya Aksara Press. Bandung
- Adha, Mona. M. 2010. *Model Project Citizen Untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Pada Konsep Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Pada Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung*. Tidak diterbitkan.
- Amsia, Tontowi. 2006. *Perspektif Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm 66
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Renika Cipta. Jakarta.
- Budinangsih, A. 2004. *Belajar dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- C. George Boeree, 2009. *Metode Pembelajaran dan Pengajaran*. Ar.Ruzz. Yogyakarta.
- Cipto, Bambang dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan Yang Demokratis dan Berkeadaban*. Diktilitbang PP. Muhammadiyah, LP3 Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta
- Dalyon, M. 1997. *Psikologi Pendidikan*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 218 hal
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm 35
- Departemen Pendidikan Nasional dan Perpustakaan. 2003. *Sistem Pendidikan*

Nasional. Fokusmedia. Jakarta.Hlm 11- 27

- Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.2006. *Perkembangan PKn Pasca KBK dan Praktik Pembelajarannya*. Depdiknas Gorontalo
- Djahiri. 1979. *Pemilihan Strategi dan Media Pembelajaran dan Portofolio Learning and Evaaluation Based*. Jakarta
- Foster, E. M. dalam Kohlberg, L. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan oleh Drs. John de Santo dan Drs. Agus Cremers SVD, Penerbit.
- Gagne, Ellen, D. 1997. *The Cognitive Psychology of School Learning*. Little, Brown and Company. Boston.
- Gagne, Robert Mand. 1977. *The Conditions of Learning*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Hartono, Agung. 2002. *Perkembangan Peserta Didik*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 61
- Hakim, Thursan. 2000. *Belajar secara Efektif*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Hakim, Thursan. 2005. *Belajar secara Efektif*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamalik, Oemar. 2004. *Proses Belajar Mengajar*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hamzah B, Uno. 2009. *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif dan Efektif*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hadi, Ismono, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm 4-77
- Hendra Nurtjahjo. 2005. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Jerolimek, John & Parker, Walter C. 1993. *Social Studies in Elementary School*. (9th ed.). New York: Macmillan Publishing Company.
- Bruce Joyce, Marsha Wail. 1986. *Models Of Teaching*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Kosasih A, Djahiri. 1992. *Pengajar Studi Sosial/IPS*. LPPS IPS IKIP. Bandung
- M. Daryono, dkk. 1998. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 2-89
- M.D. Dahlan, 1984. *Model-model Mengajar*. CV. Diponegoro. Bandung.

- Manase Malo. 1989. *Metode Penelitian Sosial*. Rajawali Kurnia. Jakarta
Hlm 7-74.
- Moh. Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta.
Jakarta.
- Munandar S, Utami.2005. *Kreativitas dan Keberkatan*. PT. Remaja Rosdakarya.
Bandung
- Pusat Bahasa DEPDIKNAS. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*.
Balai Pustaka. Jakarta.
- Purnomo Edy. 2015. *Dasar-dasar dan Perancangan Evaluasi Pembelajaran*.
FKIP Unila. Tidak diterbitkan
- Raphael, D.D. 1990. *Problem of Political Philosophy*. The M. Macmillan Press
LTD. London.
- Rositawati, Tita .2014.*Konsep Pendidikan John Dewey*. TADBIR Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam. Volume 02 Nomor 2 Agustus 2014
- Sardiman, A. M. 2004. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. PT. Raja
Grafindo. Jakarta.
- Rukhiyat, Adang. 2003. *Paradigma Baru Hubungan Guru dengan Murid*,
Uhamka Press. Jakarta.
- Srijanti, A.Rahman, Purwanto. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk
Mahasiswa*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm 45-60
- Sri Wuryan, Syaifulloh. 2008. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Laboratorium
PKn UPI. Bandung.
- Sarifudin, Udin. 1989. *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila*.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dijen. Pendidikan Tinggi.
Jakarta.
- S. Sumarsono dkk, 2005, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta
- Sudjana. 2004. *Metoda Statistika*. Tarsito. Bandung. 347 Halaman.
- Somantri, Numan. (2001). *Menggagas Pembaruan Pendidikan IPS*. Dedi
Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja
Rosda karya. Bandung.

- Soemanto. 1998. *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutrisno.S.M. & Verhaak. 1993. *Estetika. Filsafat Keindahan*. Yogyakarta6ktr`. Kanisius
- Uzer, Usman. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya. Jakarta
- Pranita,T. 2010. *Teori Belajar Konstruktivisme*. <http://edukasi.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2010.
- Winataputra, U.S. 2001. *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*, (Desertasi). Pasca Sarjana UPI: Bandung.
- Yukimanda. 2010. *Pendidikan Nilai*. Alfabeta. Bandung